

# RISALAH RAPAT

Jenis Rapat : Panitia Khusus I  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tanggal Rapat : 04 November 2025  
Topik Rapat : Membahas Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Gabungan Komisi  
Jumlah Hadir : 6 dari 11  
Pimpinan Rapat : Zet Pakan, S.Sos  
Anggota Hadir : 1. Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E  
2. Anna Fatima Zukhra, S.E  
3. Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si  
4. Muslimun, S.E  
5. Ratna Mayasari Agan, S.E  
6. Zet Pakan, S.Sos  
Anggota Izin/ Sakit : -  
Anggota Absen : 1. H. Alfian Chaniago, S.E  
2. Andris, S.Sos  
3. M. Sultan Amin Badawi  
4. Rienhard Vester Tamma  
5. Sucipto S. Rumu  
Peserta Undangan : 1. Tim Ahli Pansus I (Dr. Surahman, S.H.,M.H)  
2. BPKAD Kota Palu  
3. Bagian Hukum Setda  
4. Sekretariat DPRD

---

Jalannya rapat :

**Pembicara 1 (BPKAD Kota Palu) 13:21:07**

Betul yang Pak katakan bahwa untuk penjualan itu kendaraan itu mengikuti masa manfaat.e tapi untuk khusus kepala daerah itu ada ketentuan khusus penjualan untuk kepala daerah dan di Permendagri 7 itu juga dikuatkan dengan kepala daerah wakil kepala daerah untuk batasan Pemerintah Daerah Kota Palu itu hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk batasan provinsi itu sampai dengan sekretaris seperti itu dan itu tidak melihat batasan usia kendaraan seperti itu karena

- Pembicara 2 (BPKAD Kota Palu) 13:22:07**  
Kendaraan tapi melihat dari masa jabatan jadi di dalam Permendagri seperti itu masa jabatan kalau ndak salah saya itu kurang dan lebihnya 5 tahun ya ya 5 tahun di Permendagri seperti itu Pak dan itu ada di Permendagri 7 sudah Pak
- Pembicara 3 (Zet Pakan, S.Sos) 13:22:29**  
Dan ada nanti di matriksnya itu ada juga saya sudah baca-baca sepertinya 4 tahun itu Pak sepertinya 4 tahun tapi nanti kita akan buka nanti di belakangnya
- Pembicara 4 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:22:48**  
Setahu saya memang 4 tahun karena ada contoh dulu Pak almarhum Iksan Kalbi mobilnya itu targetnya kemarin itu di saat sudah selesai targetnya dia adalah dia mode apa langsung karena dia pakai selama 5 tahun pas di ujung maksudnya kalau sudah selesai ternyata mobil itu juga Mas anunya selesai jadi dia mau diam sendiri nah itu itu posisi jadi kalau kayak begitu hampir semua nanti mungkin ketua-ketua d atau pimpinan-pimpinan melakukan itu kan karena menganggap mobil ini sudah ke milik dia sudah juga sih Mungkin gitu tapi memang 4 tahun ya Pak
- Pembicara 5 (BPKAD Kota Palu) 13:23:35**  
Izin izin menjawab pimpinan
- Pembicara 6 (Muslimun, S.E) 13:23:41**  
Kan di DPR ini situasi politiknya berbeda Saya tidak tahu kalau kepala daerah di DPR ini tergantung partai politik yang menentukan siapa yang berhak duduk sebagai ketua tiba-tiba dalam perjalanannya ada yang terganti tapi masanya belum 4 tahun nah kira-kira tapi posisinya ke depannya misalkan dia jadi unsur pimpinan
- Pembicara 7 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:24:50**  
Iya saya mau nanya Bu Oke misalnya ibu bilang begitu Saya misalnya kita contoh lah ya kita pimpinan 4 tahun seterusnya tiba-tiba sudah saya mengajukan Apakah prioritas memang harus saya oh begitu ya cocok Intinya saya nggak menanyakan itunya prioritasnya itu oh diwajibkan prioritasnya pimpinan itu yang mengajukan itu yang dapat sebagai
- Pembicara 8 (BPKAD Kota Palu) 13:25:44**  
Izin pimpinan sebagai Sebagai tambahan kendaraan yang bisa diusulkan untuk dijual untuk dimiliki oleh unsur pimpinan itu 4 tahun Minimal dia masa jabatan dan 4 tahun dikuasai oleh pimpinan tersebut bukan bukan kendaraan yang misalnya 4 tahun tapi dalam satu tahun itu dia kendaraan kuasai kendaraan yang lain tapi kendaraan yang yang betul 2 kuasa yang 4 tahun itu juga Iya iya jangan jangan 4 tahun tapi kendaraan

yang lain yang dia usulkan itu tidak bisa seperti itu izin pimpinan nah ini seru ini ini berkaitan dengan

**Pembicara 9 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 13:26:08**

Siapa tahu ke depan jadi pimpinan jadi begini ini ini menarik ini menarik pasar ini menarik kenapa BisaKan pimpinan ini tidak semua juga mau Baden toh kita jauh-jauh dari belakang bos ini sudah tidak mau saya sudah beli saja nanti keterangan bagaimana itu atas nama itu maksudnya artinya ini kan kita ditembak anu tuh bawa kompor kompor Tuh kan pimpinan semua Anggaplah seperti Nugi dia mau apa-apa kan lagi dari belakang sudah Pak paket itu bagaimana atas nama Nugi itu maksudnya artinya Siapa tahu besok-besok bisa kompor-kompor arti ini hanya anu apa intermezo Siapa ini kan kemungkinan-kemungkinan depan kan Terima kasih pimpinan saya sedikit masih tetap

**Pembicara 10 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:27:16**

Jadi gini Setahu saya di.e pertama di pasar atau di undang-undang mewajibkan nggak harus memakai mobil dinas pimpinan Karena gini Setahu saya wakil satu wakil 2 kemarin tidak memakai mobil dinas cuma langsung terima gaji transportasi Ya kan karena gini Kak mohon maaf maupun pimpinan ini yang saya mau tanya apakah di dalam pasal ini ada enggak mewajibkan atau memang sudah diwajibkan karena apa kalau tidak kan sama aja ini kenapa ini Dam dengan gajinya hampir sama saya contohkan kalau saya misalnya pimpinan saya enggak mau pakai mobil dinas Saya mau gaji di saat gaji itu per bulan saya taruh aja di mobil sambil mobil sama aja juga selama 5 tahun dia dibayarkan oleh gaji dan dia dapat mobil baru ah hampir sama juga dengan demi ini ya kan posisinya cuma Apakah di sini karena Setahu saya di.e eh.e pertama wakil satu dengan wakil 2 itu sempat tidak mau memakai mobil dinas Apakah memang di dalam pasal itu mobil dinas cuma dipimpin oleh satu Satu pimpinan yaitu ketua DPR wakil 1 wakil 2 dapat nggak mobil dinas di pasal ini karena Setahu saya kemarin mereka nggak mau mobil dinas maunya kasih dana transportasinya aja mungkin itu anu pimpinan terima kasih

**Pembicara 11 (BPKAD Kota Palu) 13:28:39**

Ketentuan untuk apakah pimpinan ataupun anggota dewan tersebut bisa mendapatkan kendaraan atau tidak itu diatur dalam aturan lain Pak Iya jadi di sini cuman mengatur barang milik daerah sementara ketentuan untuk pimpinan ataupun anggota dewan itu mendapatkan mobil atau tunjangan transportasi itu ada di PP 18 tahun 2017 sendiri jadi berhak memilih Jadi kalau misalnya pimpinan dewan maunya dia tunjangan transfer seperti bapak sampaikan tadi memilih berarti dia tidak bisa menggunakan kendaraan boleh iya karena kan sekarang ini kan eee kalau misalnya pimpinan dewan maunya misalnya bahasa kasarnya nih Mau ee kendaraan dinas berarti dia tidak dapat tunjangan transport

seperti itu ya

**Pembicara 12 (Muslimun, S.E) 13:30:24**

Apakah ada norma yang mengatur itu atau tidak Nah apakah dia masuk di aset ini atau tidak sehingga menurut saya perdebatan-perdebatan tiwin sampaikan itu menjadi penting kenapa karena jangan sampai ketiga pimpinannya kita orang ini saya tidak mau pakai mobil dinas simbol DPR nya yang hilang kan sebenarnya plat DN 3 itu kan simbol ini nah kalau semua orang tidak mau menggunakan mobil operasional mobil dinas maka simbol DPRD ha nah maka pertanyaannya Pak Win tadi wakil pimpinan boleh tidak mengambil mobil dinas tapi pimpinan itu simbol maka dia wajib nah kira-kira dalam a tidak mengatur soal itu di aset tidak ada

**Pembicara 13 (Zet Pakan, S.Sos) 13:32:21**

Yang dimaksud adalah iya artinya kalau ada peraturan yang mengatur itu mungkin kita tidak perlu kita bahas di sini ya ya sudah ada dicatat

**Pembicara 14 (BPKAD Kota Palu) 13:32:28**

Ini pak yang dimaksud dengan pimpinan DPRD

**Pembicara 15 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:32:33**

Pimpinan Oke Pak sudah saya nggak membahas ini lagi tapi sebelum kita lanjut pimpinan saya mau mundur sedikit saya karena di sini ada Pak Gandi sedikit saja Pak Gandi saya ini kemarin sempat kita jakarta dengan Bandung 2 Kota itu kami tanya juga tentang Masalah pembongkaran yang kemarin di pasar bambaru Saya masih di gambaran saya waktu itu nggak tahu apakah Pak Gadi merasa tertekan apa nggak mengaksesikan menghilang itu dibolehkan ya kan Setahu saya Kami menanyakan ke Mendagri maupun ke Bandung dan Jakarta itu disalahkan Pak dengan proses di Pasar Baru itu adalah dibongkarnya aset daerah apalagi yang membongkar adalah masyarakat bagandi saya waktu itu saya nggak mau membantah Pak Gandi di atas itu karena saya enggak mau ada perdebatan kita antara kita karena kita berhadapan dengan masyarakat yang pro dan kontra jadi saya tidak mau bikin perdebatan di situ cuma Setahu saya harusnya saya Pak Gandi tidak saya tidak tahu mungkin bisa membenarkan diri ya Setahu saya jangan dibenarkan kalau itu salah kenapa saya bilang itu salah Pak karena ada beberapa masyarakat di dalam situ Pak yang dizalimi yang kasihan hari ini kalau dampaknya mereka hancur yang dosa kita pak karena kita memang oke kan menganggap saya menganggap pengganti menguakkan itu sama saja pengganti itu meloloskan mereka itu yang nyatanya mereka itu disalahkan karena posisi gini Pak membongkar aset daerah ataupun eee saya contohkan saja enggak usah ini ini kita bicara aset daerah juga misalkan kantor DPR saya bongkar gedung ini kalau kita tidak menyurat kita bisa pidana kita bisa salah apalagi itu membongkar gedung besar

maupun betul memang gedung baru itu sekeliling itu memang modelnya itulah dulu dibongkar tengah-tengahnya itu berapa titik yang dibongkar itu yang dulunya tidak begitu saya contohkan dulu baru oke depannya memang kosong tapi di belakangnya itu terisi dinding hari ini kan depan dan belakang itu kosong jadi orang lolos bisa tapi yang saya mau tanyakan posisinya masalah tiangnya itu Oke kalau pu sekarang bilang main tapi mohon apa ganti ini ini kita berbicara gini ini pimpinan lama dengan pimpinan baru ini kan tidak baku cocok oke walikota lama dengan walikota sekarang ini tidak baku cocok jadi kalau ada bangunannya walikota lama Walikota baru ini tidak mau sentuh Sampai detik ini kehancuran di bambar itu Walikota saja tidak hadir hadir kasihan masyarakat ada masyarakat yang di dalam itu yang betul-betul karena pembongkaran Ini jadi yang saya mau Anukan dengan Pak Gandhi kemarin sampai saya kejar ini pak di Bandung di Jakarta maupun di pendagri Kenapa Karena posisinya pertama itu Dapil saya ini sama dengan Pak muksimu kami yang dikejar oleh masyarakat sekarang kami mau bicara apa yang sudah dibongkar yang dibilang izinnya dari pak wali tapi mana surat waktu itu untuk pembongkaran ada nggak surat izin dari pak wali enggak ada berarti ini asal bongkar saja ini masyarakat karena menghilangkan kacanya tapi kan dampaknya Bagaimana harusnya perdagangan itu tidak bisa dibenarkan yang saya mau tanya yang di sini simpel daripada ini kenapa Bapak ganti bisa bilang itu dibenarkan itu saja saya mau tanya Pak Gandhi

**Pembicara 16 (BPKAD Kota Palu) 13:35:56**

Baik terima kasih Pak sebelumnya saya terima kasih banyak juga atas dukungannya bapak pada saat rapat kemarin betul saya secara sadar bahwa saya mengatakan pembongkaran itu boleh dan betul juga bahwa dari sisi eh informasi dari pihak eee Pemerintah Daerah Kota Bandung yang Bapak eh konsultasi itu melarang pemutaran tapi kita melihat dulu dari sudut pandang mana kalau dari sudut pandang Pemerintah Daerah Kota Bandung mereka mengatakan tidak diperbolehkan itu apabila pembongkaran dilakukan secara keseluruhan secara keseluruhan gedung yang secara mayoritas gedung itu pembongkaran dan menghilangkan struktur gedung seperti itu nah tapi kalau kita berbicara di sudut pandang Kasus yang di Bam baru itu kita berbicara sudut pandang pembongkaran satu titik itu yang disampaikan oleh Pak Kadis pedangan di satu titik yang tidak merubah struktur bangunan dan tidak mempengaruhi struktur bangunan dari sudut pandang Kepala Dinas PU juga seperti itu Nah dari dasar itu saya mengatakan diperbolehkan karena itu salah satunya wewenang dari Kepala Dinas Perdagangan selaku pengguna barang tapi dengan catatan itu tidak merubah struktur bangunan dan hanya membongkar sedikit saja eee bentuk eh sedikit saja bangunan tanpa merubah bentuk tanpa merubah struktur seperti itu makanya dasar itu ee kami saya eee menyatakan bahwa gedung di bank baru itu diperbolehkan untuk dibongkar seperti itu tapi dengan catatan itu

Catatan dari kepala dinas PU itu tidak mempengaruhi struktur bangunan seperti itu makanya eee kami saya mengatakan bahwa untuk di kasus Bank baru itu diperbolehkan seperti itu Pak

**Pembicara 17 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:38:06**

Hendy pak Gandhi sudah ke sana atau belum Bahkan dia sudah ke ban baru belum lihat pembongkarannya apakah ada struktur ada oleh Beliau dinding-dinding yang bunga itu kan dibongkar itu kan itu sama dengan membongkar struktur Maksudnya saya Gini pak kalau bapak bilang sedikit itu pintu bisa kita bicara sedikit ini satu Bundaran itu dia bongkar semua dibundar keliling itu ban baru itu dibongkar oleh Beliau oleh masyarakat setempat itu oleh pedagang ini kan berarti kita membongkar keseluruhan ini semua ini dibongkar ini dan ada titik ada titik yang dinding dibongkar sama beliau dinding di sebelah kanan itu sebelah sebelah selatan Itu dinding dibongkar berarti ini membongkar struktur Saya mau bicara struktur dia harusnya ini begini kalau bicara struktur Pak ganti Misalnya ini dinding ini anu rumah satu rumah ini apapun yang dibongkar berarti kita membongkar struktur ini dan ini yang dibongkar ini sekelilingnya bukan ibaratnya tadi contoh pintu masuk yang bawa Mungkin sedikit tapi ini sekeliling bambu itu dibongkar sekeliling bambu itu dibongkar oleh pria kan karena apa 32 30 lebih outlet yang ada di luar itu 32 itu dibongkar berarti ini dibongkar semua ah yang saya mau Anukan kalau kita berbicara struktur ini kalau bicara pubg barat begini ini ini contoh ini ini tiangnya dua ini yang dia bongkar ini Tentunya harusnya struktur nya itu yang dilakukan oleh Bang baru sekarang Tapi kalau berbicara pupuk cuma bilang yang penting tidak membongkar struktur tiang kalau itu sih kita sih tapi mana kita tahu bos kekuatan itu mana kita mau tahu dengan adanya beberapa di sebelah barat itu ada dinding-dinding yang mari kita tahu kekuatan yang dulunya kita harus tahu ini contoh pintu masuk dulu Bang baru itu di belakang ini tidak ada dinding hari ini hari ini waktu dibangun Hidayat dikosongkan ini karena targetnya masuk ke dalam ini ditutup sekarang kan luar dan dalam ini sudah dibongkar masalah kekuatan struktur ini mana kita tahu jadi yang saya mau Anukan saya enggak mau berbicara distruktur itu awalnya karena ini masuknya di Komisi C saya berbicara struktur tapi kan dampak di dalam situ mengganggu pedagang yang harusnya di situ waktu itu Pak ganti sebelum bicara nanya dulu kalau memang suratnya dari Walikota ada surat dari perdagangan ada saya Bolehkan itu Bos ini sudah tidak ada semua masyarakat membongkar itu asal-asal bo asal dari ibadah tak bisa rapat Begini saya minta maaf saya tidak ada dana pemerintah tidak ada dana tapi kalau bapak-bapak dan itu targetnya mereka memang jadi mereka bongkar sendiri tidak dijaga oleh pemerintah Dinas PU tidak mungkin menjaga itu kalau ada apa-apa kamu bertanggung jawab terjadi ada apa-apa bukan itu siapa yang mau bertanggung jawab karena tidak ada izin tidak ada ibaratnya absen atau apapun yang mengizinkan bahwa pak wali itu mengizinkan tapi ditanya mereka apa mereka bilang pak wali

mengizinkan kalau ada apa-apa kemarin karena apa ini sebenarnya kesalahannya dari Walikota harusnya pak wali itu sekarang ini turun di situ kasihan ini masyarakat ini Tiap hari datang ke rumah saya tiap hari telepon Mungkin telepon juga Pak Aris Miladi telepon juga Pak muslimun karena merasa terzalimi di dalam situ Pak yang harusnya simpel saja ini jadi panjang kita ini karena Dora anggap apa yang dampaknya ke mereka hari ini sampai berapa bulan dengan adanya dibongkar itu hancur itu tidak ada apa keuntungan yang untuk Coba Mungkin depan yang dalam jadi mungkin kalau saya simpelnya itu aja sih pakai para ganti maunya saya ke depan kita pelajari baik-baik oke kan Karena gini kalau kita mengungkitkan Dinas Perdagangan itu merasa kuat karena Dari aset yang memungkinkan itu barang kalau ada apa-apa ke dicariknya ditarik ulurnya kita sudah di oke kan kok Dari aset membenarkan itu padahal kalau mau dibilang Apakah membenarkan itu Pak ganti yang saya mau tanya masalah Pak Gandi bilang membenarkan itu berarti boleh itu barang itu boleh

**Pembicara 18 (BPKAD Kota Palu) 13:43:46**

Kembali lagi pak kembali lagi pada saat waktu rapat kemarin itu saya berbicara setelah Kepala Dinas PU berbicara mengeluarkan statement mengeluarkan statement bahwa struktur yang ada di bank baru itu tidak terpengaruh istilahnya statement dari dinas Kepala Dinas PU dari dasar itu pun dengan dari dasar mengingat bahwa wewenang Pasar Baru itu ada di pengguna barang Kepala Dinas Perdagangan perindustrian itulah yang dasar saya menyatakan bahwa itu dibolehkan oke terima Sekarang saya mau tanya Pak Gandi prinsip saja simpel membongkar satu aset daerah itu dibolehkan apa tidak tanpa izin tidak kalau dari mulut Walikota misalnya besok Pak Dandi Saya datang ke pak wali Saya mau suruh pak wali ini tidak ada apa coba bongkar saja Win saya bongkar Pak saya salah apa tidak secara kewenangan iya tapi secara proses administrasi itu harus di eee harus ikut administrasi seperti itu kan begini kalau lihat perdebatan ini sebenarnya teman-teman

**Pembicara 19 (Muslimun, S.E) 13:43:52**

Menyurat secara resmi tidak kan tidak ada surat hanya omongan kan secara administrasi kan sudah salah kan tidak mungkin kita berdebat di atas cuma gara-gara karena kita ini bernegara maka masing-masing ini kan punya kewenangan masing-masing contoh pengelolaan bank baru itu kewenangannya ada di perdagangan tapi mau membongkar harus seizin teman-teman nah prosedur lintasannya ini mereka menyurat tidak nah kalau mereka tidak menyurat berarti secara administrasi sudah salah walaupun tadi penjelasan Pak ganti Bahwa ini tidak merubah struktur dasarnya kan tiangnya struktur dasar tapi di sisi yang lain apakah diperbolehkan masyarakat membongkar sendiri Ini kan sudah tidak betul yang boleh membongkar itu hanya dinas anak dengan beralasan bahwa dinas tidak punya pembiayaan maka harusnya ditangguhkan dulu

pembongkaran jangan lagi dilanjutkan sebelum ada uang misalkan kalau memang dinas tidak punya uang menunggu di perubahan ya tunggu di perumahan saja dia punya pembongkaran karena ada uang Suaka kelola kan begitu tapi ini masyarakat yang bongkar sendiri kedua aset pembongkaran dari ke mana itu kaca-kaca sudah disetor ke kalian dilaporkan karena Pasar Baru saja dengan 10 AC sudah hilang eh bagaimana yang kaca yang dibongkar ini aluminiumnya tidak mau diambil besi tua itu nah sekarang pertanyaannya yang mendasar bahwa secara prosedurrahman sudah salah karena tidak ada administrasinya hanya omongan kan begitu Jadi hal-hal yang begini baiknya ke depan kalau memang ada keinginan warga ya tangguhkan dulu jangan dulu melakukan pembongkaran sepanjang uang dinas belum ada nah sekarang kalau mau ditanya kalau misalkan besok-besok kejar Pak Kadis Pak Kadis mana itu kaca mana itu etalasnya Komisi 4 di mana nah teman-teman catat Nah sekarang Kalau tidak ada pencatatan itu mau lari ke mana nah ini maksud saya dari pertanyaan Pak Amin dijawab oleh Pak ganti benang kusutnya cuma satu administrasi yang kita punya kekurangan makasih

**Pembicara 20 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:46:30**

Dan ibu urusan aset saya kalau bicara kaca masih barulah AC di situ sudah masuk pulang ke bapak atau belum ada 20 AC AC Kalau enggak salah di situ sudah dikembalikan ke bagian aset aC yang ada di ban baru AC berdiri yang berdiri itu eee mohon izin Pak ee kalau pencatatan aset tersebut itu ada di opd-nya di Dinas Perdagangan Iya Dinas Perdagangan

**Pembicara 21 (BPKAD Kota Palu) 13:47:07**

Iya sama dengan kaca tadi yang Bapak pertanyakan Iya kalau pu kalau misalnya pencatatan bangunan itu belum diserahkan ke perdagangan masih di PU berarti asetnya itu kewajiban mengamankan barang itu adalah pu seperti itu kalau misalnya sudah diserahkan kewajiban mengamankan barang-barang itu adalah perdagangan seperti itu tapi kalau misalnya bangunan misalnya masih di PU dan barang di dalam itu adalah barangnya perdagangan berarti kedua-duanya itu

**Pembicara 22 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:47:40**

Jawab di situ Pak seperti itu Ibu saya mau tanya ini bagus ini saya cuma mau tanya ini kan sudah dianggarkan dulu ini kita bicara dulu yang namanya aset daerah yang dibelikan mau dinas apapun itu itu tidak tahu tidak diketahui oleh aset bagian aset kita punya datanya Pak secara keseluruhan Jadi kalau misalnya Bapak mau

**Pembicara 23 (BPKAD Kota Palu) 13:47:53**

Itu kami buka data dulu apakah dia tercatat di Dinas Perdagangan ataukah dia tercatat di dinas PU saya setuju misalnya Dinas Perdagangan tapi di saat di dinas

**Pembicara 24 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:48:06**  
Aset tersebut dengan ibu ada kan Datanya ada

**Pembicara 25 (BPKAD Kota Palu) 13:48:16**  
Mohon izin Pak Datanya itu biasanya apa pihak ketiga dalam hal ini pihak ketiga ataupun yang membeli aset kalau misalnya dia include di Mangunan saya Kalau kami melihat Kalau kami mau pastikan itu apakah dia pembelian atau biasanya itu include dengan pada saat dibangun bangunan itu kan beda Pak pencatatannya Bukan begini Bu saya berbicara simpel saya dulu Ini ban baru ini ase

**Pembicara 26 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:48:38**  
Berarti di dalamnya pun aset daerah mau asem Apa itu diketahui tidak dari pihak aset makanya saya jelaskan dulu pak mohon i

**Pembicara 27 (BPKAD Kota Palu) 13:48:59**  
Saya jelaskan dulu tata cara pencatatan Kalau misalnya itu barang misalnya contoh AC dia didapatkan dengan pembelian misalnya dia dibeli oleh Dinas Perdagangan berarti itu langsung dicatat oleh Dinas Perdagangan tapi kalau misalnya aset tersebut include di dalam bangunan itu kan yang bangunan itu Yang bangun pihak ketiga nah pada saat penyerahan bangunan include dengan segala macam item yang ada di dalamnya termasuk AC ataupun barang-barang termasuk diadakan pada saat pembangunan pembangunan tersebut gedung tersebut berarti dia include di penyerahan pekerjaan hasil pekerjaan ke opd mana yang diserahkan barang tersebut seperti itu Jadi kita itu kalau Dari aset kami hanya melihat catatan catatan barang misalnya bank baru Oh ada gedung Bam baru tercatat di PU misalnya di dalamnya itu di pho-nya itu ada di yang rincian barang mungkin termasuk dengan AC itu pasti ada di dalam Pak uraiannya dari kami melihat itu kami melihat catatan tersebut dari catatan Dinas PU karena kami bisa melihat semua pencatatan berdasarkan keseluruhan opd itu yang ada di kami selaku pengurus barang pengelola oke

**Pembicara 28 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 13:50:05**  
Yang saya mau simpel ya aset bagian aset tahu enggak ada aset di dalam aset ini bisa bicara Bang baru nih gedung Asep kan aset daerah ini dalamnya aset daerah AC Oke kalau kita berbicara dinas yang mana tapi bagian aset Bunda yang mendata itu tahu enggak ada di dalam kertasnya Bunda atau di dalam laptop itu Bambang itu ada di situ enggak ada tahu aslinya semua ada di situ enggak ada ada kan mestinya baik ah mesti ada kan Tapi ada misalnya sudah dicatat oleh opd-nya pak ini Asep sudah jadi lama masa tidak ada di dalam Bunda punya itu ban baru Pasti ada kan ada Oke AC di dalam kan sudah lama ini dari zaman walikota lama Ada kan Ada itu itu yang maksudnya bisa kami mana itu asetnya

Mbak itu AC itu ada berapa karena kalau misalnya Ibu Ratna di komisi B tanya AC di bank baru ada berapa orang bilang 10 nyatanya dengan ibu ada 20 itu yang saya mau tanya ada nggak dengan ibu Datanya ada sudah cocok

**Pembicara 29 (Zet Pakan, S.Sos) 13:51:15**

Baik masih ada sudah iya kita kembali ya

**Pembicara 30 (BPKAD Kota Palu) 13:52:19**

Akhirnya padahal itu tercatatnya di Dinas Perdagangan jadi contoh kecilnya seperti itu Pak Terima kasih maksudnya begini Ini kan Kalau lihat

**Pembicara 31 (Muslimun, S.E) 13:53:23**

Terlepas dari iniperdaya yang kita mau Toki ke depan nah teman-teman iniantisipasi tidak contoh misalkan ke depan baiknya memang kita sudah menggunakan sistem elektronik aplikasi Nah kita berharap Seperti penjelasan Ibu Neni sebelumnya karena dia berkunjung ke Makassar tinggal main klik saja ketahuan Oh Koperasi asetnya ini semua nah maksud saya sebelum jadi ini Perda baiknya teman-teman lakukan finishing terkait soal aplikasi sehingga kalau Perda ini diketuk kita tidak repot-repot lagi mencatatnya karena dia sudah terincloud di dalam jangan menunggu hujan tapi siapkan memang payung nah payungnya apa Cari memang orang yang pembuat aplikator aplikasi untuk kebutuhan ini jangan nanti sudah di ketuk perdanya aplikasinya tunggu 2 tahun nama saya itu yang sudah harus mulai disiapkan ini hanya saran saja sehingga pertanyaan-pertanyaan menurut saya hal yang sepele ini menjadi rumit karena tidak saling koordinasi ini antara opd dengan teman-teman nah ke depan kita tidak mau lagi model-model begini kita mau memang betul-betul ini hanya masukkan saja makasih

**Pembicara 32 (Ratna Mayasari Agan, S.E) 13:55:02**

Ya saya langsung saja mungkin ini bisa menjadi catatan rekomendasi dari Pansus apa yang disampaikan oleh pakimung itu benar seharusnya yang pertama saya mau tanya dulu untuk sistem pencatatan yang ada di badan aset kota Palu itu sekarang seperti apa Apakah sudah menggunakan sistem atau belum kalau memang belum minggu ini kita lagi membahas anggaran jadi sebaiknya memang Pansus ini kita harus mendukung juga badan aset ini kalau memang belum ada anggarannya kita masukkan anggarannya karena pengelolaan aset ini menjadi penting catatannya adalah semua barang yang ada di opd manapun yang menggunakan dana APBD wajib dicatat menjadi aset itu wajib nah Dari teman-teman aset juga harus menunggu laporan dari opd dulu baru tercatat Apakah di badan aset ini ada nggak tim pengawas aset kalau belum ada silakan dibentuk Ini saran kalau memang butuh honorinya dan lain sebagainya sampaikan pada kita sehingga ini juga bisa kita

masukkan nantinya kita perjuangkan dalam pagar Kenapa badan aset ini sebenarnya penting cuman kadang-kadang dianggap sebelah mata mencatat saja tapi tidak kemarin kita Pansus beberapa teman kita ke Makassar itu sistemnya bagus sekali begitu juga di Bandung semua opd yang mengeluarkan dana dari APBD itu wajib tercatat bukan cuman itu tetapi hibah yang bersumber dari hibah dan bantuan sosial lainnya itu juga wajib tercatat jadi dengan satu klik kan Misalnya opd ini kita tahu tahun ini asetnya apa semua jadi tidak bertanya-tanya penjelasan itu tidak rancu tetapi sesuai seperti contoh yang disampaikan Pak Win hari ini baru ac-nya apakah dia punya kaki atau bagaimana jalan-jalan nah ini kan sebenarnya pencatatannya harus jelas ke mana asetnya pun itu harus ada di dalam sistem itu keterangannya apa termasuk juga alat kendaraan yang bergerak misalnya seperti itu Bahkan mereka di sana itu ketika aset yang sudah tercatat dipegang oleh si A dan tidak Dikembalikan pada saat dia selesai atau dia pensiun itu SK pensiunnya tidak akan pernah dikasih sebelum dia kembalikan artinya ada aturan-aturan yang pemerintah kota Palu juga harus buat sehingga pengelolaan aset daerah ini akan menjadi lebih jelas nah ini menjadi Saran saya teman-teman silakan karena ini kita lagi mau membahas bangga untuk 2026 jangan sampai pembahasan sudah selesai baru muncul ide-ide itu menunggu lagi 2027 atau perubahan jadi ini Mungkin bisa dimasukkan direkomendasi pimpinan sebagai catatan Pansus terima kasih makasih Bu Neni bisa

**Pembicara 33 (Zet Pakan, S.Sos)**

**13:57:53**

Itu untuk recom Pansus silakan Pak Arif bundari ya terima kasih pimpinan

**Pembicara 34 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si)**

**13:57:59**

Ini seru lagi ini ini Berbicara masalah hilang dan menghilang kalau hilang berarti memang benar-benar kalau menghilang dihilangkan yang saya mau tanya ini kita menguasai satu aset daerah nya jauh-jauh ini atau Infocus ini kan barang kecil tapi mahal yang selalu dibawa-bawa namanya manusia ada biasanya khilaf kelupaan dan hilang atau biasa juga hilang diambil orang beda itu khilaf kehilangan dan hilang dan memang Kehilangan yang saya mau tanyakan ketika kita hilang ini barang ini bukan bukan kita khilaf ya bukan tapi memang ini orang dicuri orang statusnya bagaimana ke kita apakah kita mengganti atau bagaimana kalau memang harus mengganti Bagaimana dengan barang di bank baru tadi yang diambil orang itu apakah harus dicari orang untuk mengembalikan supaya ada pemerataan ada keadilan di sini gitu kalau kita dikejar barang ini harus kita ganti Bagaimana ini Bang baru yang AC hilang itu kalau tidak di kalau tidak dikejar berarti tidak ada keadilan terus bagaimana dengan penguasaan aset yang barang-barang kantor ini seumpamanya hilang Siapa yang bertanggung jawab seumpamanya hilang Ini laptopnya di bagian sekretariat dewan hilang Siapa yang

bertanggung jawab Apakah stafnya yang memakai itu atau sekuatnya atau siapa ini kan harus juga kita perjelas ini supaya maksudnya namanya kita manusia ini kan Ya khilaf ada perlu ke hati-hati yang kira-kira terus yang kedua ini kan barang kan kalau aset seperti tab yang begini ini pemutihannya berapa tahun ini supaya maksudnya Ya kalau memang sudah dianggap kadaluarsa sudah untuk kita batas waktunya kan batas waktu apa namanya saya kurang paham pak Gani mungkin bisa Jelaskan batas waktu barang ini kadaluarsa apa begitu aset itu bisa apa namanya diperbaharui dan segala macam kalau diperbaharui barang yang lama Bagaimana statusnya

**Pembicara 35 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 14:00:49**

Pimpinan Ibu Ningsih Ibu Ningsih curhat tadi teman-teman curhatan Ibu Ningsih cuma ini saya mau contoh bu Ningsih Saya menambahkan yang disampaikan Pak Arif Miladi bagus tadi contohnya gini Pak Gandi aset ini bagian aset Ibu apakah ada tanggung jawab atau ada bukan sanksi sih contoh Ibu Neni punya Tab tapi bukan ibu Deni punya berarti aset dari pemerintah sekretariat rusak total rusak pecah intinya Di saat dia dikembalikan dengan rusak itu selama pemakaian bagian aset itu ada tanggung jawab atau cuma menerima aja intinya kembali itu barang paham Enggak Maksud saya Ningsih jadi sesuatu barang itu kayak contoh AC tadi AC Ini kan hilang mohon maaf asli itu baru dibeli di bank baru baru itu baru semua itu 20 unit sekarang enggak tahu di mana tapi tiba-tiba dari Dinas Perdagangan titik a titik B titik c titik D misalnya yang harusnya dari bank baru ditarik dikembalikan ke aset misalnya atau dikembalikan Bagaimana tapi karena masih dipakai oleh perdagangan sampai hancur total batasnya bagian aset ini sampai mana Apakah dikembalikan intinya programnya satu aset itu ada kita catat selesai atau ada sanksinya dari bagian aset kalau tiba-tiba rusak mana Kan kita memberikan baru ini Pak Pak Gandi Saya diberikan itu oleh dinas terkait baru dibeli dikembalikan hancur total yang penting bagian aset itu bagaimana menerima aja atau bagaimana Bu

**Pembicara 36 (Zet Pakan, S.Sos) 14:02:39**

Ya silakan ada beberapa pertanyaan tadi termasuk

**Pembicara 37 (BPKAD Kota Palu) 14:02:54**

Ya karena masih segar terkait dengan barang hilang nah ataupun rusak berat sebenarnya kalau misalnya barang hilang itu tidak ada kata-kata yang bisa kami keluarkan selain ganti rugi tetap harus ganti rugi itu diwajibkan nggak di bagian aset wajib Ya wajib tiba-tiba

**Pembicara 38 (Abdurrahim Nasar Al'Amri, S.E) 14:03:18**

Baru rusak tidak mungkin saya mau kasih baik saya kembalikan aja kan Bukan ndak punya saya aset daerah itu yang anunya kalau hilang Pak belum selesai saya Pak belum kalau hilang nah halnya dengan beda

halnya dengan rusak berat

**Pembicara 39 (BPKAD Kota Palu) 14:03:34**

Perlakuan untuk barang rusak berat itu bisa diakui ketika pencatatan kita tertib ada yang namanya rekondisi Kalau diistilah kami rekondisi barang tersebut misalnya Bapak Contohkan tadi tablet tablet ataupun iPad atau apalah namanya ketika dikuasai oleh seorang seseorang Taruhlah itu stafka kemudian pejabat kah ataupun anggota dewan seperti itu Halo Pak Wim lah oke dalam satu tahun atau 2 tahun barang tersebut rusak pecah layarnya jikalau misalnya memang itu memungkinkan untuk diperbaiki itu kembali lagi ke opd-nya dikembalikan ke pd-nya belanja pemeliharaan seperti itu ketika barang tersebut ketika ditaksir tidak lagi bisa diperbaiki atau ongkos perbaikannya itu sudah lebih 50% lah atau lebih baik membeli baru daripada apa namanya kita memperbaiki silakan barang tersebut diusulkan untuk dihapuskan dengan cara dipindah tangankan dalam hal ini kita akan jual dalam proses lelang seperti itu walaupun barang itu rusak berat kayak bapak bilang tadi itu barangkali sudah hancur kah barangkali tinggal bangkai kah itu harusnya dari opd-nya melaporkan itu ke Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dalam hal ini kami lah yang akan meneruskan tindak lanjut penatausahaannya seperti itu Pak tapi untuk yang awalnya itu kita kembali lagi selalu tusi Dari aset ini semuanya ada di opd Jadi kami ketika melakukan tata cara pemindahtanganan ataupun penghapusan itu berdasarkan usulan dari opd seperti itu Pak iya seperti itu kemudian juga kenapa barang tersebut harus Siapa yang bertanggung jawab nah di opd Sekarang kami lagi eee apa namanya mewajibkan ya Karena itu adalah perintah dari eee bukan perintah sih Eh kebutuhan pemenuhan eee data mcsp sekarang namanya dari mcp KPK kemarin sekarang menjadi mcsb itu adalah fakta integritas siapapun yang menguasai atau memegang barang itu dia akan menandatangani fakta integritas ketika barang tersebut hilang ataupun ya hilang lah berarti yang memegang barang itu adalah bertanggung jawab untuk mengembalikan barang tersebut gitu Nah itu tindak lanjutnya nanti ada tim penyelesaian kerugian daerah yang eee sekretariatnya ada di inspektorat dan nantinya kalau misalnya barang-barang mungkin yang menguasai ataupun yang melakukan kerugian terhadap negara itu tidak mengganti atau tidak menyelesaikan itu akan dinaikkan ke majelis penyelesaian kerugian daerah yang dalam hal ini diketahui oleh diketuai oleh ibu sekretaris daerah yang bertanggung jawab adalah pemegang sesuai dengan fakta integritas

**Pembicara 40 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 14:06:47**

Anggaphlah teh ini hilang kalau hilang kan ini sudah tidak ada barunya ini bagaimana cara perhitungannya ya dihitung tim lagi dengan harga yang harga mundur kah atau harga dengan sesuai harga

**Pembicara 41 (Bagian Hukum Setda) 14:07:15**

Mempertimbangkan harga pasar berarti kan kalau seumpamanya harga ini kan tidak mungkin lagi harganya yang pula ada ada keluaran kan itu terdata keluaran tahun berapa jenis produknya apa dan nanti akan dinilai oleh tim jadi itu menjadi dasar nanti Berapa nilai yang harus digantikan dalam majelis kerugian negara jadi ini memperketat semua kondisi keadaan terhadap aset-aset

**Pembicara 42 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 14:07:36**

Ada di tangan semua operator berarti nanti dihitung kembali ya Iya ini kenapa saya tanyakan begini karena ini barang kecil pak ya kita bawa kemana-mana kita tidak tahu ini pak Apalagi kita sering bawa keluar kota kan ini kan kita tidak minta-minta tapi kan ini harus kita supaya ya mudah-mudahan kita

**Pembicara 43 (Bagian Hukum Setda) 14:08:00**

Makanya kewajiban kita pak harus menjaga dan mengamankan aset yang ada di tangan kita iya kalau itu sudah pasti Pak kalau memang tercecer tercecer karena kelalaian dianggap kelalaian kita pak cuma permasalahannya ini keyboard-nya ini sampai sekarang rusak-rusak ini bagaimana itu segera dikembalikan sama Pak Bayu supaya Pak Bayu nilai kalau memang rusak rekondisi tadi segera diganti yang baru supaya ini bisa diperbaiki atau diganti yang baru supaya tidak menghambat ada uang

**Pembicara 44 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 14:08:34**

Tenang saja yang penting aman kalau kaum muslimin senyum berarti so aman di dunia ini terima kasih

**Pembicara 45 (Zet Pakan, S.Sos) 14:08:37**

Iya baik agak agak panjang lebar tadi kasus kita kembali ke pasal pembahasan iya saya lihat kalau kita mau lihat di perumahan di sini Justru lebih lama kita di sini karena ini adalah usulan perubahan dan justru menjadi lama kita di sekitaran sini bagaimana kalau kembali Saya tawarkan dari beberapa pasal ke pasal berikutnya iya supaya kita masing-masing sudah bagaimana Ibu Wakil Ketua

**Pembicara 46 (Ratna Mayasari Agan, S.E) 14:09:35**

Sekian iya iya mempersingkat waktu karena ke depan masih banyak Pansus lagi mungkin ditawarkan saja pak ketua berapa pasal kalau ada yang perlu ditanyakan ditanyakan kalau tidak berarti disahkan pasal-pasal makasih baik

**Pembicara 47 (Zet Pakan, S.Sos) 14:09:44**

Saya mulai dari 355 Ya sambil kita memperhatikan martil juga ya 355 sampai 360 pak Wim belum ada dokumennya boleh diberikan Sampai 360 bagaimana

- Pembicara 48 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 14:11:19**  
Pasal 358 sama 359 itu diubah Mungkin itu saja yang kita lihat berdasarkan di matriks pasal 358 359 itu diubah untuk mempersingkat mengefisienkan pembahasan ini saya kira kita lihat saja di di matriks itu ada pasal yang diubah itu saja mungkin kita menjadi condong ke situ izin saja saya
- Pembicara 49 (Zet Pakan, S.Sos) 14:11:47**  
Ya silakan siapa bisa menjawab khusus yang merah-merah ini yang ada penambahan ini
- Pembicara 50 (BPKAD Kota Palu) 14:12:47**  
Mohon izin Pak ketua yang merah-merah ini itu yang Kami jelaskan tadi terkait penjualan langsung mendagri baru dia sudah menyebutkan di situ bahwa ada pimpinan dewan ketambahannya dengan mantan seperti itu ya tidak iya iya kemudian yang lain itu ada penambahan kata dan dan semua sampai ke bawah berarti semua yang merah-merah itu Ketambahan sesuai dengan permen Permendagri 7 tahun 2024
- Pembicara 51 (Zet Pakan, S.Sos) 14:13:32**  
Oke 355 sampai 360 oke Kita lihat 361 sampai ya sampai 365
- Pembicara 52 (Zet Pakan, S.Sos) 14:15:24**  
Ya sampai 365 tidak ada masalah kita buka 366 sampai 70 370 Ya ini tidak ada perubahan juga hanya perubahan kata-kata nengdi yang dilengkapi baik 371 sampai 375 coba lihat Bagaimana anggota pimpinan d tiara ada penambahannya ya pimpinan
- Pembicara 53 (Ratna Mayasari Agan, S.E) 14:19:21**  
Yang saya mau tanyakan ini mekanisme kalau melihat penjualan barang milik daerah ini kan ada dua sistemnya bisa dilelang bisa secara langsung nah kalau dilelang ini kan kita lewat kpnkl kan ya terus untuk secara langsung bisa berarti kita bisa menjual secara langsung kepada pihak ketiga nah ketentuannya selain kendaraan kalau saya kan melihat beberapa pasal tadi ini yang dibahas adalah kendaraan dinas selain barang itu mungkin Secara teknis barang apa yang bisa atau mungkin ada nilai yang ditentukan yang bisa dijual secara langsung tanpa melalui proses lelang Ini kan harus kita tahu jangan sampai juga Makanya tadi saya bilang pentingnya itu adalah eee Satgas Satgas ee Satgas pembentukan Satgas barang milik daerah yang mungkin berada di dalam badan aset sendiri untuk gunanya adalah mengawasi untuk mengawasi barang-barang milik daerah tersebut nah adalah seperti apa mekanisme terkait dengan barang yang dapat dijual langsung kalau dilelang kan ada proses pengumuman dan sebagai tapi kalau bisa dijual secara langsung itu kan bisa saja diam-dia ini bukan berarti suudzon tidak tetapi secara

Mekanisme seperti apa itu yang mau saya tahu terus di pasal 385 ini kan pasal 385 ini terkait dengan tukar menukar barang milik daerah bisa kita lakukan dengan pemerintah pusat pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah Nah itu mekanismenya seperti apa dan contohnya seperti apa ini harus mendapat penjelasan kita supaya kita terang benderang terkait pengelolaan barang milik daerah ini mendingan

**Pembicara 54 (Zet Pakan, S.Sos) 14:21:14**  
ya silahkan dijawab

**Pembicara 55 (BPKAD Kota Palu) 14:21:22**  
Kalau sesuai dengan apa Permendagri 7 yang bisa dilakukan penjualan langsung itu adalah cuman kendaraan iya selain itu tidak bisa terus terkait dengan tukar menukar Nah ini kan kalau proses tukar menukar di sini kan kita di pemerintah kota Palu belum pernah nih baru akan baru akan nah ini nanti kabar hukum juga pas ada di sini terkait dengan tukar menukar contohkan ini masih ada proses sekarang ini yang untuk tukar menukar terkait dengan hantap kemudian pembangunan jalan di jalan cumi-cumi juga ada karena itu kan kemarin ada sPBU Arba yang dilalui oleh jalan baru jadi itu rencananya sesuai rencana itu akan dilakukan tukar menukar barang milik daerah nanti pun nanti akan pemberitahuannya itu akan sampai ke sini ke dewan terkait dengan rencana tukar menukar tersebut pun kalau itu sudah terlaksana nanti akan ada pemberitahuannya ke sini seperti itu karena ada beberapa titik dan letak kalau di unta itu ada lokasi yang bersinggungan dengan lahan dari salah satu dari pengembang yang bersinggungan lokasinya kemudian yang di jalan cumi-cumi olahan SPBU itu sudah kita pakai untuk jalan eksisting yang sekarang pada saat pasca bencana kemarin Kalau tidak salah kasus Arba ini kan sudah lama di zaman kacuri

**Pembicara 56 (Muslimun, S.E) 14:23:00**  
Yang harusnya itu tukar guling sudah dilakukan Nah ini kan prosesnya yang tidak jalan sampai sekarang Kalau tidak salah Ingat saya pak Ahmad Umayya dulu sempat sampaikan dibakar nah di sisi yang lain selain itu ada jalan milik tanahnya Pak Sultan ini supaya bisa jadi kalau untuk urusan Jalan sebaiknya ini bisa diusulkan dua untuk ganti rugi karena jangan sampai Kalau Pak Sultan tutup dia punya jalan Orang mau lewat mana Nanti karena itu Jalan Soekarno Hatta nah kalau itu bisa prosesnya dianggarkan atau mau tukar guling kan tidak mungkin mau tukar guling lahan di mana lagi pemerintah di atas itu nah baiknya kalau saya teman-teman mumpung di keuangan itu Jangan sampai karena saya dengar wacana ini sudah waktu provokasi orang untuk mau tutup jalan karena luas juga itu kalau dia tutup mau orang setengah mati lewat di Soekarno Hatta makasih

**Pembicara 57 (Zet Pakan, S.Sos) 14:24:37**

Ya mungkin perlu dicatat ini Ibu

**Pembicara 58 (Ratna Mayasari Agan, S.E) 14:24:41**

Sedikit lebih detail lagi saya mau bertanya tadi terkait dengan tukar-menukar terkait di untap itu prosesnya Seperti apa Karena kan kita di kota Palu belum pernah kan itu secara isu biar ketika ada masyarakat yang bertanya kita juga memahami itu makanya saya minta penjelasan dari pemerintah kota terutama badan arsip dan bagian hukum untuk menjelaskan kronologi terkait tukar menukar yang ada di untap nah terus kalau kita tukar-menukar Apakah ini dalam artian seperti yang dicumi itu kan sudah kita pakai dengan rupiah atau seperti apa Karena ini juga akan berhubungan nanti dengan banggar kita harus mengecek juga nah ketika tukar-menukar misalnya dengan nilai itu sudah ada timnya Menyetujui hal-hal yang belum kita tahu secara detail makanya lewat Pansus ini juga kita

**Pembicara 59 (BPKAD Kota Palu) 14:26:28**

Pas ada apa kabar hukum di sini namun secara asetnya saya berbicara kalau proses tukar menukar Apalagi kita baru di sini Bu ya kami tetap mengikuti prosedur yang ada di Permendagri baru maupun Perda yang akan kita sahkan nantinya seperti itu di sini sudah gamblang dijelaskan tata cara tukar menukar itu seperti apa dan kami akan melalui itu makanya sekarang kami betul-betul hati-hati karena di tim juga kita dapat Apakah itu kita lakukan tukar menukar atau kita lakukan hibah seperti itu Jadi kami masih juga membedah Aturan ini Apakah kita mau tukar menukar atau kita tidak bisa langsung memutuskan itu tukar menukar seperti itu Ibu nah kemudian yang kedua terkait dengan apa yang mau ditukarkan apakah dia berupa uang atau kalau tanah kembali ke tanah seperti itu Nah contoh kasus kalau di kasus huntap itu kan itu adalah tanah karena yang bersinggungan itu adalah tanah milik salah satu pengembang dan tanah milik Pemda Jadi ceritanya pengembang mengambil tanah Pemda dan Pemda mengambil tanah pengembang seperti itu kalau itu prosesnya kalau tanah dengan tanah kita nilai apresia lagi Bu kita apresia lagi Berapa luas tanah yang diambil Pemda begitu pula dengan berapa luasan tanah yang di ambil oleh pengembang seperti itu Jadi kita bermain di nilai apresia yang akan menentukan nilai kalau misalnya nilainya sama berarti luasannya harus sama beda halnya ketika misalnya kita kalau dicumi-cumi kalau dicumi-cumi kan misalnya contoh kalau misalnya yang tadinya punya lahan SPBU di cumi-cumi dengan Arba kita harus tanah yang kita tukarkan itu harus luasannya itu sama dengan nilai tanah yang ada di cumi-cumi tapi sekarang hari ini saya heran di negeri ini untuk sekarang ini kita belum dapat kesepakatan Apakah itu kita mau tu

**Pembicara 60 (Bagian Hukum Setda) 14:29:11**

Iya terima kasih anggota dewan tadi sudah dijelaskan begitu panjang

lebar terkait tukar menukar yang pertama proses ini sementara berjalan khusus hantap satu Tondo di mana pada saat hantap 1 Tondo ini ada sebagian tanah itu dibangun kontak 1 milik dari salah satu developer yaitu PT ark yang di mana Pada saat itu sudah didesain dan sudah terbangun kurang lebih ada catatan terakhir 13 unit ya bangunan yang sudah berdiri di atas tanah pT Ark maka ini yang sementara akan dinilai kembali oleh tim Karena itu kan menu kalian harus membentuk tim dulu setelah tim jadi baru dinilai berdasarkan kondisi dulu dikaji dulu Ada kajian sosiologisnya filosofis dan pertimbangan-pertimbang dan lain-lainnya panjang ini Pak setelah itu nanti disampaikan kepada dewan terhormat terhadap hasil kajian dan penilaian apresiasi apakah ini wajar untuk dilakukan tukar-menukar atau tidak karena ini menjadi satu proses juga catatan terhadap nilai tanah dan nilai tukar itu paling tidak sama tidak boleh terjadi deviasi antara nilai pemerintah punya lebih lebih harus tidak boleh dia lebih besar dari yang urusan tanah saya ini Pak Kabag tolong diselesaikan ini menjadi catatan maka saya dengan tim dari bidang aset sudah melakukan beberapa kali pemetaan pengukuran didukung oleh teman-teman tata ruang teman-teman dan beberapa instansi yang mendukung sehingga ini kami sementara berjalan dan nantinya akan nanti hasil ini nilai dari pengukuran ini kami serahkan dulu di apresial untuk mendapatkan Berapa nilai kewajaran perhitungan dari dua objek yang akan dilakukan tukar menukar ini bukan cimona himona Joko punya lain hantap 2 Tondo kalau 2 tahun 2 tahun ini tidak tukar menukar tetapi karena hgb nya kami dalam penguasaan dan hgb itu sudah selesai maka kebijakan terakhir yang diambil oleh Pak Walikota mengalah Mengalah bukan dalam hal memberikan tetapi mengalah dalam hal masyarakat Tondo dapat anda dan masyarakat talise dapat tanah dan juga dibangun persetujuan untuk khodam yang lainnya itu silakan saja Joko dalam penguasaan tapi saya sampaikan kepada pimpinan Walikota 2 tahun dia tidak ulang kita rampok ulang tanahnya karena kalau tidak begitu kan kita tidak bisa berdaya Pak beliau Tajur kuat dengan sistem tetapi kami juga harus membuat strategi juga untuk mendapatkan tanah yang begitu luas yang pertama kalau itu disetujui kita mendapatkan tanpa gangguan lagi hantap 2 Tondo yang sebenarnya dikasih hanya 30 hektar tetapi kita menguasai 60 hektar kelebihan kita kuasai maka terjadilah gejolak-gejolak orang ke kanan kiri dan dijadikan tersangkanya ketua yang lama Pak Dokter saya lupa beliau jadi tersangka sekarang tetapi saya bilang jangan naik kasusnya karena saya pelaporan Joko beliau sekarang tersangka tapi saya sudah lapor izin saya lapor sama Kapolda saya minta Jangan naik kasusnya karena kalau naik kasusnya kasihan beliau beliau ini orang baik tidak dapat satupun tetapi membangun dengan ikhlas untuk hantap dua Tono beliau ditetapkan tersangka persoalan tersangkanya persoalan sepele beliau mengeluarkan satu surat menyatakan tanah Tondok clear dan clean di tahun 2011 pada saat hgb sudah berakhir tapi konstruksi hukum dibangun bahwa beliau yang menyatakan ini menjadi beliau yang di

tersangka iya itu yang diminta sama Pak Yogi dibebaskan makanya kasus ini kami sudah mundur satu langkah kemarin setelah berapa minggu lalu saya dengan pak wali ketemu dengan Menteri uang dalam hal ini ditemui wakil menteri dan pak wali sudah menyampaikan kami setuju apa yang Jokowi minta dengan catatan meminta tiga meminta tanah untuk masyarakat Tondo masyarakat talise dan untuk Kodam terakhir data luas terakhir itu ada dua pak ada sinar waluh yang SPM total luasnya itu 200 hektar lebih evaluasi bukankah kita pemerintah BPN melakukan evaluasi terhadap aktivitas dari hgb-hgb ayo persoalan ini pak yang punya kewenangan dalam hal ini Kanwil dan BPN tidak melakukan itu maka dianggap bahwa kegiatan-kegiatan hgb di atas itu itu berjalan terus walaupun tidak ada sama lagi aktivitas makanya itu yang jadi kendala Pak tapi mudah-mudahan langkah positif yang kami dapatkan dari kemarin kakak nulis yang terbaru sekarang ini merespon positif dan kemarin sudah mempresentasikan kembali kondisi keadaan berdasarkan hasil investigasi lapangan terhadap wakil menteri karena diundang oleh menteri dan disampaikan kepada Joko sebagai pemilik hanya menunggu sein dari Pak Joko dia akan kembali menguasai 70 hektar area tanah yang ada di 200 tadi masih ada 72 hektar Pak dia punya penguasaan ya itu sudah diambil pemerintah Pemerintah sudah hampir 100 lebih kita kuasai Pak Iya kalau hgb itu Pak dia pertama waktu keluar izin 30 tahun bisa diperpanjang 20 tahun makanya dia 2 tahun sebelum terakhir dia mengajukan permohonan pada saat 2019 pada saat terjadi bencana dia majukan permohonan iya Untuk 20 tahun lagi makanya ya Makanya saya bilang izin semua anggota dewan saya sampaikan kepada Pak Walikota kita mundur satu langkah tapi akan kita maju 2 langkah ke depan pada saat ini sudah clear semua ini harus clear dulu Pak clear semua dulu supaya UNTAD clear tanah masyarakat clear pandank clear kalau dia sudah dapat izin 2 tahun dia tidak gerak kita rampok kalau kita nanya kan kita rampok lagi tanah kita lihat yaitu membangun 2 tahun kita menyampaikan kita ambil lagi tanahnya Pak nanti kita buat Pak Iya jadi ini harus strategi mundur dulu Pak untuk mengantisipasi karena beliau ini kan bukan orang yang sembarang juga karena kekuatan ini terlanjur besar powernya Pak sedang menteri saja tidak berani untuk melakukan penindakan terhadap Jokowi ini sekelas menteri bah kan Iya setelah menteri karena dibalik Joko Itu semua adalah bintang 2 dan bintang 3 ya kami ini bintang tujuh pak Bintang Sakit kepala jadi saja Pak itu tentara apa tidak berani juga ini sudah sesuai administrasi Apakah penghukum menurut saya dari 200 kalian sudah ambil 100 lebih yang hebat kita daripada dia Iya itulah strategi kita pak strategi kita untuk mengalahkan orang yang lebih kuat jadi lebih bagus kita tapi kita akan mendapatkan keuntungan jadi izin Pak yang kedua terkait dengan saran tadi terhormat Pak muslimin Jalan Soekarno Hatta itu kenangan provinsi Pak jalan ini adalah kewenangan provinsi yang bukan jadi kewenangan kota tetapi izin eee kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan instalasi-instansi teknis yang disampaikan yang anggota dewan juga pemilik tanah

atau masyarakat pemilik lahan segerakan kita tindaklanjuti itu Pak Segera Secepatnya akan sebelum terjadi gejolak di masyarakat memang kami sudah men-schedulekan tetapi agenda kami kan banyak ini pak jadi mohon maaf nanti dekat-dekat ini itu menjadi agenda juga yang akan dibicarakan jalan dulu itu digusur dulu Pak yang terjadi tahun 9 saya lupa itu digusur dulu baru dibangun jalan jadi mudah-mudahan karena banyak Pak bukan hanya jalan itu Pak Termasuk yang akan kita lakukan tukar-menukar jalan cumi-cumi gitu juga penyampaian yang terhormat dulu Pak Ahmad Umair terkait huntap eh pembangunan rumah nelayan Pak yang ditukar dengan jalan cumi-cumi itu juga menjadi masalah Pak ada 30 KK yang bergantung terhadap kita nanti yang pertama huntapnya rumahnya sudah hancur yang kedua tanahnya tidak jelas makanya mungkin ini menjadi catatan juga yang terhormat semua kita akan coba nanti melihat mungkin melalui siapa punya Dapil melihat kondisi sana tanahnya ini kita kelihatan baru kita bangun kembali yang sama huntapnya dengan huntap yang hancur di Kampung Lere karena itu ada sekat Pak ada perbedaan jadi yang dapat pun tapi itu rumahnya sudah permanen Pak yang nelayan dulu itu rumahnya langsung menghancurkan Pak jadi nanti ini menjadi catatan juga dan itu memang sesuatu hal yang disampaikan mudah-mudahan nanti kalau ada titipan sama Pak muslimat ya Pan muslimat yang ujung tombak Amin aminkan di belakang mungkin itu Terima kasih

**Pembicara 61 (Zet Pakan, S.Sos) 14:41:54**

Mumpung kita bicara tanah Sampaikan tadi mundur satu langkah maju 3 langkah kalau perlu kita ambil semua wilayah pembangunan kita Ini arahnya ke Tondo khususnya Tondo bagian atas ini yang saya saran saja ini bagian atas itu adalah penyangga penyangga hujan sekarang kita alami banjir tiba-tiba itu karena kita coba kita lihat di atas ada di atas itu adalah tebang timbun potong timbun jadi meratakan gunung tanpa melihat jalur air dari atas makanya di bawah ini ada yang banjir tiba-tiba banjir tiba-tiba sakit undator banjir tiba-tiba itu dulu-dulunya kan mari kita lihat di atas gunung Mungkin ada yang dipotong dan timbun potong timbun tandanya Jadi mohon dengan semua update terkait Mohon diperhatikan di atas itu terutama ini yang Developer agung mutiara bahagia ini Saran saya segera kita Perda kan itu Perda hijau Iya betul beda kawasan juga H1 Pak Kenapa pada kawasan di dalam kawasan kita ini tidak mempertimbangkan bentang alam

**Pembicara 62 (Bagian Hukum Setda) 14:44:00**

Bentang alam itu Pak sangat berisiko kalau ditutup pak jalur air jalur alam jalur ini itu kalau bentang alam Pak saya itu artinya Mohon maaf Pak di pemerintahan dulu saya itu toponimi itu Pak bentang alam itu kalau dirubah Pak itu harus dihitung tidak boleh langsung asal tutup dan asal bangun dia akan iya iya saya tidak bilang kerjanya beliau hanya beliau tidak ada pak cepat kita bahas selesai ini BMKG mana kita tahu

**Pembicara 63 (Zet Pakan, S.Sos) 14:44:59**

Di bawah tanah itu kita tidak tahu di bawah sampai di mana mereka sudah bongkar di bawah itu jadi baik kita tinggalkan dulu itu usulannya Pak muslimin segera hijau ya oke baik kita kembali ke pembahasan kita sampai 385 tadi sekarang kita buka 386 sampai ya agak-agak pendek oke sampai 395 lah oh belum di tok ya baik 385 sampai 395 386 sampai 395

**Pembicara 64 (Zet Pakan, S.Sos) 14:47:05**

Sampai 395 tidak ada baik kita lanjut 396 ya sampai 400 Sampai 400

**Pembicara 65 (Muslimun, S.E) 14:48:51**

Saya penting untuk apakah ini masuk di aset atau tidak Ini wilayah tapal batas contoh misalkan beberapa hari yang lalu kan saya reset nah kita berbatasan dengan Sigi nah di wilayah perbatasan itu muncul banyak pengembang nah yang soal tanggung jawab pengembang ini itu yang menurut saya yang menjadi masalah karena ini menjadi wilayahnya tata ruang dengan perkim tapi syarat untuk membangun tanggul di wilayah perbatasan karena yang membuat banjir kemarin itu kan wilayah kebun enak nama saya apakah ini diatur di dalam sini soal karena kan ini antara wilayah Palu dan Sigi nah kira-kira perda ini atau tidak karena kalau mau melihat tanggung jawab kan harusnya itu tanggung jawabnya developer tapi kalau itu diatur oleh pemerintah daerah lewat regulasi Apakah itu aset yang punya Bagian untuk memberikan apa saran ini juga penting karena ya mau tidak mau wilayah perbatasan itu kalau tidak dibangun Tanggul penahan-penahan hujan ini pasti nanti tempatnya teman-teman yang di wilayah pasti akan kena kan Soal status lahan kan miliknya aset daerah karena ada di wilayah perbatasan kan nah kira-kira bagaimana

**Pembicara 66 (Bagian Hukum Setda) 14:55:47**

Baik terima kasih yang teramat Pak muslimin terkait dengan perbatasan memang dua hal yang sebenarnya kalau dalam regulasi batas wilayah kalau kabupaten kota menjadi ranah provinsi untuk memfasilitasi terkait dengan pembangunan dampak ini ini efek dampak ini pak memang dalam regulasi ini tidak mengatur secara detail terkait barang dan jasa BMD ini barang milik daerah dia terlepas dari ini jadi tidak di sini regulasinya regulasinya itu itu terkait dengan perencanaan yang sering disusun secara sistematis dan biasanya itu biasanya kalau pembangunan itu berbatasan dengan wilayah itu biasanya ada di dalam pembahasan rpjmd kita biasanya makanya dalam rpjmd kita itu kan harus ada hulu dan hilir ini wilayah hulu di sini biaya Hilir yang nampak kalau ini terjadi itu kota Palu makanya Mungkin koneksitasi ini yang dibangun Pak konektivitas antar roda pemerintahan ini itu yang terjadi Pak contoh saja tambang kemarin tambangnya kan ada di wilayah Sigi tapi akibat dari tambang di wilayah Sigi adalah masyarakat typo makanya ini yang kemarin ditutup karena tidak terjadi suatu hal yang saling mendukung dalam hal roda

pemerintahan makanya kalau ini terjadi pakai tanggul ini sebenarnya itu yang koneksi tasnya karena kalau rumah sudah di atas tentu makin kecepatan air itu di atas itu akan buangnya kalau biasanya ini pak pengiriman padat di bawah drainasenya sempit tentu akan menjadi imbas kemana-mana makanan yang terstruktur ini tapi tidak masuk dalam ranah BMD ini Pak karena Pak ranah BMD ini cenderung Tadi hanya penjualan pencatatan aset dan lain-lain pertanyaan bapak perencanaan kita ke depan yang harus koordinasi terus dengan pihak itu yang saya Katakanlah dulu saya di pemerintahan pak itu dikoordinasi pak di toko Nini Jadi kalau hulu membangun a dengan kepadatan sekian jadi kita harus connect ini Pak rencana di sana apa jangan dia susun di sana perencanaan pemukiman kita di bawah yang buangan pemukiman karena harus menghitung kalau pemukiman tentu akan terjadi buangan air yang imbasnya ke kota kan itu yang harus dihitung Pak karena berimbas kepada masyarakat kita makanya ya itu tapi tidak diatur sini pak tidak diatur di regulasi ini dia diatur Mungkin setelah terjadi dampak tetapi saran Pak muslimin sangat positif kita harus mempertimbangkan itu Pak karena ada tiga daerah kita yang atasnya adalah wilayah siji dari dari Tipe sendiri baru Donggala kodi baru masuk ke sabu Nina baru itu semua di atasnya Sigi semua kan bukan wilayah kita wilayah sini hanya kalau kita tidak mengatur dulu juga itu di atasnya wilayah sini juga kalau kita tidak mengatur tentu apa yang ada di sana bunganya kepada kita semua yang ada di kota Palu karena tidak mungkin airnya di sana kita mau drop suruh masuk ke dalam tanah tidak boleh masuk Kabupaten tidak mungkin yang ini yang mungkin kita harus Urba dan terus terang saja Pak di daerah Donggala kodi itu ada sungai besar itu Pak yang membentang di perumahan tapi sekarang di atas 20 m Pak di bawah 5 meter ini satu-satu menjadi bom waktu ini pak yang terhormat kalau imbasnya tidak mampu lagi menampung debit air di atas 20 m hancur perumahan-perumahan yang ada di makanya itu yang saya karena kemarin saya ukur Pak di atas itu dia lebar sungainya 20 m Pak di bawah 5 meter kalau dia full 20 meter itu dia apa membuang semua menampung semua air hancur semua itu kamu anu itu Pak jembatan Sila dan kemarin iya Dan itu menjadi catatan kita itu Pak sebenarnya strategi strateginya harus kita rubuhkan rumah-rumah yang ada di harus berkoordinasi dengan Perumahan dan tata ruang karena kalau tidak ini akan menjadi persoalan yang akan kita hadapi di kemudian hari Karena beda diameter antara bawah hulu dan hilir mungkin itu tambahan saya terima kasih

**Pembicara 67 (Zet Pakan, S.Sos) 14:56:19**

Ada tambahan paham sampai pasal 400 ya silakan kita lihat pasal 41 sampai saya lihat tidak ada perubahan sampai 410 ya di sini tidak ada perubahan kita coba lihat di matriks tidak ada perubahan 410 Ini tentang hibah ini Tiara ya iya mari kita lihat pasal 411 sampai 45 15  
yaah aman  
sampai 418

419 sampai 425

426 ini pendek-pende sampai sampai 435 lah

**Pembicara 68 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:08:31**

Izin pimpinan berkaitan dengan pasal 431 pemusnahan dilakukan dengan cara titik dua yang saya ingin tanyakan di situ Di poin 431 poin yaitu pemusnahan dapat dilakukan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bisa dijelaskan dulu ya Secara lain ini seperti apa ya kan seperti apa Karena begini di pemahaman saya kalau ketika kita berbicara dengan cara lain kan ada di sini masa-masa masa waktu barang kan ada masa manfaatnya itu kan ada Apakah itu juga masuk dalam kategori cara lain mungkin bisa dijelaskan sedikit

**Pembicara 69 (Zet Pakan, S.Sos) 15:09:50**

Ya sebelum di jawab pak seperti yang disampaikan Pak Arif tadi pemusnahan ya mohon diperjelas lagi umur-umur kapan ini pemesanan bisa dilaksanakan ini ya batas umurnya baik baik

**Pembicara 70 (BPKAD Kota Palu) 15:11:25**

Terima kasih izin pimpinan menjawab apabila kita berbicara tentang masa manfaat umur manfaat itu berbeda-beda jenis barangnya ambil contoh kayak alat komputer itu masa manfaatnya terhitung 4 tahun terus mebeler itu terhitung 5 tahun kendaraan itu terhitung 7 tahun berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah diatur oleh peraturan Walikota seperti itu apabila kita berbicara tentang pemusnahan yaitu dilakukan apabila tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dipindahtangankan caranya yaitu ditenggelamkan dikubur atau dibakar atau ditimbun contoh misal kami untuk melakukan pemusnahan yang barang yang tidak bisa dijual Seperti kayu potongan-potongan kursi itu kami bawa ke TPA katuna untuk ditimbun seperti itu itu karena memang untuk proses pemusnahannya diatur seperti itu supaya untuk menghilangkan pun itu dibuatkan berita acara seperti itu begitupun dengan obat-obatan obat-obatan yang warsa itu dimusnahkan dengan cara tergantung jenis obatnya apabila dia aman untuk ditanam itu ditanam jadi Permendagri ini mengatur cara lain untuk dimusnahkan Apabila ada barang-barang tidak bisa di akomodir oleh cara seperti itu karena kami juga belum tahu apakah ada barang-barang itu yang cara pemusnahannya jadi Permendagri membuka ruang untuk barang-barang yang depannya untuk cara pemusnahan itu tidak bisa dilakukan dengan metode seperti yang tadi itu begitu kalau dengan ini

**Pembicara 71 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:12:03**

Dengan cara lain ini apakah boleh dia seperti pemutihan apa apa istilahnya saya saya contohkan begini laptop seperti Pagang disampaikan tadi masanya tempat tahun nah saya kasih contoh lagi kita punya tab ini

kan sudah lebih dari 4 tahun itu bagaimana

**Pembicara 72 (BPKAD Kota Palu) 15:12:29**

Itu kita berbicara tentang penjualan ini kita berbicara tentang pemusnahan pemusnahan sekali lagi dilakukan apabila tidak dapat digunakan tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dipindah tangankan kalau kayak ini masa manfaat berarti bisa dipindah tangankan berarti kita tidak berbicara pemusnahan di situ kita berbicara pengusaha apabila memenuhi point itu

**Pembicara 73 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:12:50**

Seperti itu Ini masa pemanfaatannya kan 4 tahun sudah lebih berdasarkan aturan berlaku masa pemanfaatannya 4 tahun ketika lebih berarti bisa dijual di pindah tangankan ya kan begitu kan berarti ini bagaimana statusnya ini yang sudah 4 tahun lebih ini mohon izin Pak sedikit izin Pak Tua ini berbeda halnya ketika kita

**Pembicara 74 (BPKAD Kota Palu) 15:13:11**

Pemusnahan dengan berbicara pemindahtanganan ya kalau pemusnahan di sini seperti yang sudah dicontohkan tadi kita misalnya potongan-potongan kayu yang biasanya kursi kelas biasanya di sekolah SD maupun SMP seperti itu yang ketika dinilai Ketika kita melihat nilai ekonomisnya itu itu tidak dapat lagi dipindah tangankan di pindah tangankan ini salah satunya adalah dijual kita jual jadi memang barang-barang yang sudah rongsokan betul-betul punya nilai rupiah Pak seperti itu Nah kalau yang dibilang tadi pemindahtanganan dengan penjualan yang Bapak Contohkan tadi Mungkin Bagaimana dengan halnya halnya dengan tablet ataupun laptop yang memang rusak berat itu kan walaupun rusak berat Pak kalau kita dilihat masih ada nilai manfaatnya biasanya kan kami melihat nih merusak berat tidak bisa lagi difungsikan terus dia tidak hidup lagi biar dicas biar dia Apa Pokoknya bisa tapi kan ketika kita nilai jual bangkai itu masih ada nilai rupiahnya itu masih bisa kami jual Pak jadi belum belum masuk dia dalam kategori pemusnahan gitu jadi dia masih kategori pemindahtanganan Jadi dua hal yang berbeda antara pemusnahan dengan ee pemindah tangan gitu walaupun misalnya ada barang contoh nih bangkai dari PC pC dari komputer Kan biasanya kan itu kami sudah jual sekitar dua kali lelang dua kali lelang barang tersebut tidak ada yang mau beli gitu Nah itu bisa dijual langsung gitu dengan diumumkan bahwasanya ini ada barang yang tidak lagi ya kita hubungi penjual besi tua dan mereka bertransaksinya dengan kita itu bukan langsung kita nilai kita serahkan nilainya silakan bayar langsung ke R KUD seperti itu Jadi ada semua Tata caranya jadi bukan berarti bangkai tidak diperlukan tidak bisa lagi digunakan itu eee kita anggap bisa dimusnahkan tidak seperti tepat tergantung dari barangnya gitu terima kasih

- Pembicara 75 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:15:36**  
Oke Pak Ketua
- Pembicara 76 (Zet Pakan, S.Sos) 15:15:47**  
Iya baik terima kasih sampai 40 sekarang kita sekarang kita masuk di pasal 438 36 3 4 3 6 sampai 438 loh 3438 masih tentang tata cara pemusnahan  
Ya saya lihat ini pemusnahan ini semuanya ditentukan oleh Walikota ya
- Pembicara 77 (BPKAD Kota Palu) 15:17:23**  
Kadang di BKKBN itu ataupun di rumah sakit ataupun di Dinas Kesehatan ada biasanya obat-obatan yang sudah seperti itu Nah ini yang dimaksud tadi yang prosesnya itu bisa dibakar karena mereka punya alatnya Seperti itu kemudian kadang ada kita pernah Pak musnahkan kondom ya alat-alat yang sudah kadaluarsa seperti itu contohnya Pak
- Pembicara 78 (Zet Pakan, S.Sos) 15:18:18**  
Baik sampai 138 sekarang kita masuk di pasal 439 sampai 445 445
- Pembicara 79 (BPKAD Kota Palu) 15:18:37**  
Yang ditemukan oleh BPK kemarin itu kan tidak diketemukan keterangannya Pak tapi kami verifikasi Ali kembali itu kita verifikasi Ali kembali dan kita koordinasi dengan 9 opd yang ada sampel barang yang tidak ditemukan Ada beberapa barang memang yang masih ada nah itu itu juga salah satu perbaikan untuk kita ternyata dari barang-barang yang tapi awalnya kemarin itu dari BPK pada saat mereka mengambil sampel tidak ditemukan itu ternyata ada contoh buku-buku yang puskesmas buku-buku istikharah ya istikharah itu kan untuk pemeriksaan mata jadi ternyata kami koordinasi kami turun langsung ke Puskesmas ternyata buku-buku itu perlakuannya juga kita kembalikan lagi ke penatausahaan Pak kita bukukan kembali karena ternyata buku tersebut memang masih jadi aset Jadi kami kembalikan lagi pencatatannya itu ke barang dan jasa yang kemudian kita akui kembali itu menjadi aset yang ada di mana Namanya di Puskesmas tersebut itu salah satu contohnya kemudian juga contoh juga kayak di PU di PU itu kan ternyata barang yang tidak diketemukan itu sebagian besar pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan anoa dan Sepanjang Jalan Kartini Nah itu ternyata pohon-pohon itu pada waktu itu sebagai belanja modal makanya itu juga yang kami catat kembali yang kita kembalikan lagi jadi tidak semua yang temuan kemarin itu kita hapuskan
- Pembicara 80 (Muslimun, S.E) 15:20:22**  
Coba teman-teman belajar ke Bogor di Bogor ini pohon mereka registrasi bahkan di asuransikan nah maksud saya kalau itu dibeli dari belanja modal harusnya ya teman-teman kerjasama dengan dlh sehingga kalau ke depan ada orang bawa tembang dan dia terbang tanpa sengaja Dia

kena penindakan pengrusak dan dia bisa bayar nah maksud saya jadi begini kita mau kota ini kan menjadi hijau Bagaimana caranya ya kalau Bila perlu di sertifikatkan di asuransikan Kenapa karena itu penting contoh misalkan jenis tanaman jenis tanaman khususnya palu dalam foto ini kan mulai hilang kayak pohon mahoni yang dulu besar-besar itu tergantikan dengan jenis ketapang yang secara bikin rusa jalan yang Kencana itu kan secara struktural untuk perlindungan lebih tahan Mahoni ini ketimbang Ketapang Kencana termasuk Kenapa tidak modelnya kita belajar pengalaman di Bogor nah sehingga Kenapa Bogor itu mampu mereka pertahankan pohon yang ratusan tahun ribuan tahun ya karena itu di asuransikan nah ini hanya masukkan saja Maksudnya ke depan ini bisa bekerja sama dengan opdldh supaya bisa diregistrasi ini pohon-pohon ini karena kita tidak tahu kemungkinan besar misalkan di wilayah Ulu Jadi hampir semua kan untuk pertambangan padahal dulu banyak sekali pohon ganti ruginya mana nah jangan sampai hilang karakter itu nama saya ini penting lah buat masukan teman-teman

**Pembicara 81 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:22:06**

Pimpinan Ya silakan saya menyambung apa yang di samping apa muslimun berkaitan dengan pohon ini kan juga menjadi asetnya kita kan karena pengadaannya juga pakai APBD nah jadi pertanyaan saya ini kan Dewi Sartika Saya tidak berbicara jalur 2 mungkin daerah provinsi kan Dewi Sartika kan masih dalam kota kalau masalah itu kan waktu perbaikan Jalan pelebaran jalan itu kan ada penebangan pohon itu pertanyaan saya apakah pohon yang ditebang ini untuk pelebaran jalan sudah registrasi atau belum kalau sebelum tadi registrasi kalau sudah teregistrasi berarti di sini ada penghapusan iya kan penghapusan aset Apakah itu sudah dilakukan atau belum Nah kalau seumpamanya belum teregistrasi sebaiknya ke depan semua pelindung-pelindung jadi penyangga ke depan kita menjadi kota hijau itu diregistrasi memang supaya tidak ada lagi nih penebangan pohon sembarangan karena saya kadang sudah dibangun ditebang apalagi kayak macam contoh kabel PLN itu melintas jadi berlawanan kita punya antara aturan dengan di PLN Apakah ini selama ini tidak ada Sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak seumpamanya Telkom PLN karena terus terang pemerintah Daerah Kota Palu menanam pohon apakah ini sumber koordinasi dengan pihak terkait supaya nanti begitu pohonnya tumbuh ya tidak ada lagi pemangkasan pemangkasan lama-lama kan saya mau bilang begini dampaknya pohon rimbun kabel PLN di tengah-tengah akhirnya lama-lama berat sebelah ketika hujan ini terjadi ini akhirnya tumbang karena bebannya sudah tidak seimbang Yang tadi rimbun begini karena ada kabel pnn ditebang di sini di sini pohonnya berat sebelah ini yang terjadi kebanyakan begitu hujan tumbang dan ada korban nah korban juga mau menuntut ini kan harusnya yang disalahkan siapa ini harusnya kan pemerintah kota karena itu tadi harusnya ada registrasi dari awal supaya sama-sama nah ini yang mungkin ya saya tidak tahu lah mudah-mudahan

belum teregistrasi ya mula-mudahan asep bisa secepatnya mendaftarkan ini supaya Baru melakukan koordinasi secepatnya dengan pihak terkait karena ini sangat rawan kita juga jadi orang Palu ini jadi risih sebenarnya ditanam itu bang ditanam ditebang akhirnya ya kalau tidak ada penguatan itu ke depan sampai kapanpun kita kan begitu terus Sekuat apapun aturannya akan begitu terus nanti kalau tidak ada perintahkan Saya kira itu saja Terima kasih izin pimpinan saya coba menyambung

**Pembicara 82 (Muslimun, S.E) 15:25:18**

Ini Perda gitu lintas Kapan jalannya karena terkait soal kabel-kabel nyangkut di pbf itu sudah ada investornya

**Pembicara 83 (Bagian Hukum Setda) 15:25:44**

Sebenarnya sudah di Lembar daerah kan hanya memang sisa mau dipaparkan ke beberapa vendor makanya kemarin saya disampaikan untuk segera menyampaikan kepada provider provider dan vendor-vendor pemerintah kota Palu saya jadwalkan Minggu depan saya sudah mau memaparkan itu sebenarnya itu bukan bagian hukum bagian hukum ini setelah terjadi regulasinya bukan lagi untuk tetapi opd tenis yang sebagai Leading sektor meminta kabar hukum yang jadi presentasi lagi ya Minggu depan saya bilang pak akan saya presentasikan ke semua provider dan vendor yang ada di pemerintah kota Palu khususnya untuk Telkom dulu dan jaringan-jaringan yang berhubungan dengan kabel bukan listrik ya kabel-kabel ada televisi dan lain-lainnya supaya mereka Paham betul ini perkembangan kota dan pergerakan kota kita ke depan ini mungkin itu tambahan dari kami terima kasih iya pak betul sekali perlu disosialisasikan karena saya lihat ada tiang-tiang lagi Mereka lagi tanam tiang-tiang

**Pembicara 84 (Zet Pakan, S.Sos) 15:27:03**

Antara itu kumpul di situ mereka bongkar-bongkar tembok yang pinggir jalan ada berapa saya lihat itu akhirnya tiang-tiang yang akhirnya rumus semua

**Pembicara 85 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:27:19**

Di media sosial itu ini lucu juga ini orang di Facebook masalah yang ini menggantung utilitas juga yang kita perdagangan kemarin ini kan habis di aspal kenapa digali lagi ya Itu itu yang kemarin saya juga sebenarnya berpikir Iya juga cuma kan kalau kita tahulah mungkin karena apa namanya proses pengangkatannya barangkali mungkin jaringan utilitas Kalau nggak salah ya Nah ini apakah dari awal memang dari pihak yang Mbak aspal ini dengan Pemkot ada koordinasi ketika sudah di aspal ya atau tidak satu kali di grup satu kali kerja baru di aspal gitu karena ini kan komennya masyarakat ini kalau dibaca lucu-lucu juga jadi memang Pak kita ini apa ya dalam pelaksanaan itu konektivitasnya yang belum maksimal jadi antara perencanaan pelaksanaan dan evaluasi itu tidak

tidak pernah baguslah mudah-mudahan ini ya lebih maksimal lah Jangan nanti sudah dibaiki sudah diaspal eh di Gale lagi contoh jalur 2

- Pembicara 86 (Bagian Hukum Setda) 15:29:00**  
Jalur 2 sudah di aspal datang dia bilang jembatan pemotong jadi inilah mungkin ya kita akan segera memperbaiki itu supaya perencanaan pelaksanaan dengan tahun anggaran itu semua sama semua Pak karena ini Antara Ada yang mau kejar cepat ada yang berulang Tayang ada yang harus jadi mau mengejar target makanya mungkin ke depan Pak tapi saran masukan menjadi catatan kami semua Mungkin itu hal-hal yang
- Pembicara 87 (Zet Pakan, S.Sos) 15:29:28**  
Ya baik sampai 445 kita buka 446 446 sampai 450
- Pembicara 88 (Muslimun, S.E) 15:32:53**  
Tunggu dulu itu status ini terkait soal status lahan ini di 449 di 449 ini bagaimana kronologinya dulu Ini Ibu Ningsih terkait soal rumahnya Kacu di yang dijadikan kantor pos apakah itu aset kota atau rumah pribadi yang di mukanya Mukanya ini mukanya hotel wisata itu asetnya siapa dulu itu aset kota di sampingnya apa apa itu Ya baku muka dengan bis Harvest karena di situ sekarang dia di kantor apa inspektorat dulu Kalau tidak salah kan rumah kediaman kacukan di situ nah bagaimana statusnya itu status lah
- Pembicara 89 (BPKAD Kota Palu) 15:33:59**  
Minimal pimpinan saja satulzin menjawab pimpinan sekarang posisi itu menjadi kantor Inspektorat pun dengan tanah dan bangunannya menjadi eee pencatatannya itu tercatat sebagai kantor inspektorat seperti itu ini kota walikota perumahan DPR ini di mana atau memang tidak ada cuma Palu ini kadang tidak ada Perumahan DPR ini pimpinan eee secara historis e rumah DPR itu berada di Jalan Zebra yang sekarang ya ketua untuk ketua yang sekarang di tempati menjadi Kantor brida Badan riset inovasi Daerah seperti itu secara historis dulu itu ee rumah dinas DPRD biasanya begini Kenapa terjadi perubahan moment Creator ini cuma kuota ini yang tidak
- Pembicara 90 (Muslimun, S.E) 15:34:02**  
Jadi kalau harusnya nah cuma kan menjadi pertanyaan besar kan teman-teman bertanya di mana rumah jabatan DPR Kota makanya kita orang juga bingung nah perubahan nomenklaturnya itu bagaimana dulunya ini sampai rumah jabatan pimpinan ini tidak ada sama sekali
- Pembicara 91 (Bagian Hukum Setda) 15:37:06**  
Rezeki dari dulu ya izin sebenarnya apa ya kita sudah membangun sebenarnya dua kali ya kantor DPR jadi yang pertama Dulu dibangun di bekas inspektorat kota Palu itu Perumahan untuk ketua DPR selang tidak

ditempati pemanfaatan penggunaannya dialihkan alih fungsikan menjadi inspektorat dibangun kembali jadi kantor setelah itu dibangun lagi untuk tiga yang di jalan tangkasi jadi 123 untuk ketua dan dua wakil ketua satu terbakar dua Tertinggal satu diserahkan untuk dipinjam pakai ketua Kejaksaan sekarang diakibatkan alihkan kepada Kejaksaan Negeri Palu satu jadi Kantor Berita Satu masih kosong pak yang terbakar walaupun itu nanti strategis Di mana Ketua DPR ini kan terkadang mohon maaf yang terhormat anggota dewan semuanya pemerintah juga ingin membangunkan fasilitas untuk DPR hanya kebiasaan kita kalau anggota DPR atau ketua DPR orang tua lebih dia dominan tinggal di rumah itu yang kebiasaan itu yang mungkin menjadi tidak jujur regulasi mengatakan setiap pimpinan negara berkewajiban tinggal di rumah negara tidak ada perintah dari regulasi kalau ada perintah dari regulasi begitu berarti dia pejabat negara harus taat terhadap aturan negara ya tidak ada di sini pak tidak boleh di BMT Pak karena ini menjadi catatan pejabat negara dia bukan menjadi barang milik daerah mungkin itu jawaban kami pak kami mohon maaf minta jawaban Kecuali Pak muslimin soal panjang umur ketua DPR saya bangunkan rumahnya Pak terima kasih

**Pembicara 92 (Zet Pakan, S.Sos) 15:37:25**  
Baik sampai 450 kita buka 451 451 451 karena pendek-pendek 60 4 ada 4

**Pembicara 93 (BPKAD Kota Palu) 15:40:05**  
Mohon izin paket tua ini tambahannya karena diperdelama ataupun di Permendagri lama dasarnya kita itu belum dijelaskan secara terperinci seperti ini sebab lain yang dimaksudkan dalam Perda ini makanya banyak ketambahan di sini terkait dengan penjelasan dari sebab lain yang dimaksud gitu terima kasih

**Pembicara 94 (Muslimun, S.E) 15:42:07**  
Bang ini kan Kalau lihat kota Palu ini ada beberapa aset yang memang bukan milik kita terutama fasilitas publik contoh sekolah-sekolah saya sekolah-sekolah kalau di kroscek yang bersertifikasi dan menjadi milik kota ini kan baru sedikit nah yang perlu dipertegas di kita ini jangan sampai ahli waris lagi bagus buat kota kau kita nah di tahun ini ada tidak untuk masuk anggaran mengambil untuk fasilitas sekolah itu karena Setahu saya sekolah-sekolah SD yang belum dimiliki oleh pemerintah kota

**Pembicara 95 (Bagian Hukum Setda) 15:43:00**  
Izin Pak Muslimun yang kami hormati Kemarin kami habis rapat dengan KPK terkait dengan aset-ase ada di pemerintah kota Palu memang ada seribu lebih yang belum bersertifikat target kami dengan KPK dan rapat kemarin itu disampaikan kepada kepala BPN Untuk segera menyelesaikan semua sertifikat sertifikat yang ada di pemerintah kota

Palu khususnya terkait yang strategi-strategi terkait juga dengan sekolah-sekolah sekarang ini dalam kondisi memang aman-aman memang banyak hal yang dikhawatirkan kita itu juga menjadi catatan tersendiri oleh pemerintah kota Palu makanya sekarang itu khusus sekolah-sekolah itu menjadi skala prioritas jadi Sudah dibuatkan namanya surat keterangan riwayat tanah surat keterangan riwayat tanah itu bukan skpt riwayat tanah itu adalah penguasaan fisik dan Yudis dan daftar fakta jadi itu dibuat oleh teman-teman supaya bisa menjadi catatan bahwa itu milik pemerintah kota yang telah dikuasai lebih dari 20 tahun dan itu bisa dibuatkan riwayat-riwa singkat terhadap sekolah tersebut terkait nanti itu semua sudah dibuatkan ada sengketa kita bilang silakan saja di pengadilan kita menguji materinya karena ini juga banyak Farm yang baru itu langkah strategi dan itu juga ada hal-hal yang ada teman Asep karena ini ditangani oleh pak Gani pak Gani

**Pembicara 96 (BPKAD Kota Palu) 15:44:59**

Izin menjawab Pak pimpinan bahwa memang kemarin hasil dari koordinasi dengan rapat KPK bahwa kami juga berkoordinasi dengan dinas tata ruang Pertanahan yang mempunyai wewenang untuk melakukan per sertifikatan bahwasanya mereka telah berkoordinasi dengan baik oleh pihak BPN Sampai dengan saat ini ada 15 dokumen sekolah yang diajukan untuk menjadi sertifikat nah itu yang KPK tagih janji komitmen kepada Kantor Pertanahan untuk memudahkan Pemerintah Daerah Kota Palu untuk melakukan per sertifikatan seperti itu selanjutnya nanti Apabila ada sengketa-sengketa KPK bersedia untuk bermediasi melakukan ya menjembatani seperti itu untuk melakukan proses pensertifikatan

**Pembicara 97 (Muslimun, S.E) 15:46:15**

Yang di luar Dari aset kota contoh gelanggang mahasiswa gelanggang mahasiswa ini kan sebenarnya mau dipakai oleh warga tapi aset Masih Milik Untad nah pernah tidak pemerintah kota minta itu ketimbang sekarang terbengkalai dan tidak digunakan

**Pembicara 98 (Bagian Hukum Setda) 15:46:41**

Izin pak kemarin Pak Walikota Belum secara lisan menyampaikan kepada Rektor dan Rektor pada prinsipnya masih berkoordinasi kepada Dikti persoalan aset dari Universitas Tadulako semua di bawah Dikti bukan di bawah Universitas Tadulako walaupun dari Dicky nanti disetujui baru gelanggang itu menjadi dapat diserahkan kepada pemerintah kota Palu mudah-mudahan dapat diserahkan dan menjadi lapangan Mini sepak bola atau apa yang kita persiapkan untuk di gelanggang itu yang menjadi sekarang terbengkalai karena dari unta juga tidak melaksanakan aktivitas di sana karena ada dua juga Pak di depan itu juga sebenarnya perumahan itu provinsi itu Pak perumahan Dinas Sosial tapi juga ya tanya banyak tandanya provinsi Pak amblas dia kasih kota Palu nanti ke kota

Palu Yang bangun di situ cukup luas tapi ya itulah namanya kebijakan-kebijakan yang sulit kita juga meminta itu kalau itu dia kasih Pak banyak bisa kita buat di kota Pak tapi ya itu juga karena sulit meminta Pak karena saya meminta sama dengan dianggap mengemis kita ini pak Mungkin itu saja dari saya terima kasih

**Pembicara 99 (Zet Pakan, S.Sos) 15:47:54**

Ya saya melanjutkan yang dikhawatirkan Pak muslimin ini Saya juga setuju tentang 1000 1000-an khasiat yang belum bersertifikat iya ini ya seribuan ini apakah sudah termasuk dalam nilai yang disebutkan beberapa hari kemarin itu sekitar 2T sudah termasuk Ya sementara belum bersertifikat jadi saran dari Pansus mohon dipantau terus ini yang ada 15 sekolah dan seterusnya nanti kita nanti dari BMD dan terkait untuk terus menggalang sertifikat ini supaya menjadi betul-betul aset Pemkot Baik terima kasih

**Pembicara 100 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:49:01**

Karena ada kaitannya dengan pasal 460 di sini dikatakan permohonan penghapusan barang milik daerah di poin 1 dengan alasan hilang ini saya tadi yang saya tanyakan tadi itu yang pertama karena kecurian sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 460 harus melampirkan surat keterangan dari kepolisian nah terus yang di Point b nya surat keterangan dari pengguna barang minimal memuat identitas pengguna barang pernyataan mengenai atas kebenaran barang itu hilang dan Pernyataan di kemudian hari bahwa bukti adanya unsur kelalaian maka tidak menurut kemungkinan bersuka dan gerakan sanksi nah akan dikenakan saksi kalau ada unsur Kelayan yang saya mau tanyakan kembali lagi yang pertanyaan awal ini kan kita sudah jaga ini terus tiba-tiba apakah kita harus mengganti karena saya sudah baca ini tidak ada itu pasal penghapusan ini coba Ibu baca dari pasal penghapusan sampai terakhir tidak ada itu namanya mengganti selama tidak ada unsur kelalaian dan bisa dipertanggungjawabkan yang hilang dan dibuktikan dengan keterangan hilang kalau ini kalau ini tidak kita detailkan ini kan jadi jadi bias penafsirannya kita iya kan di satu sisi dari bagian aset dan bagian dari Ibu tadi menjelaskan harus mengganti bertanggung jawab tapi di pasar ini tidak menjelaskan itu iya kan karena di sini juga kalau ada unsur kelalaian tapi sekarang ini barang di rumah tidak diminta-minta musibah atau bencana alam contoh kayak macam kemarin gempa bumi tsunami iya kan ini ini ini ini rasionalkan rasionalkan saja ini kira-kira seperti terima kasih ya terima kasih

**Pembicara 101 (Bagian Hukum Setda) 15:51:40**

Perasaannya ini hilang karena kecurian hilang bukan karena dihilangkan iya Jadi kalau dia kecurian maka dia harus memenuhi poin a poin B yang menjadi dasar Bagaimana barang itu dianggap kecurian bila bila dia hilang tadi fase perasaannya tadi bukan kecurian tapi karena hilang

karena kelalaian ini lalai ini dalam bahasa hukum kan Alfa dan karena kealfanya jadi dia tidak sengaja tapi hal ini karena kelapanya karena di situ ada namanya berita acara penyerahan barang dengan dibuat fakta integritas di situ ada pernyataan dia bertanggung jawab terhadap barang yang dia jaga dia patut menjaga dan merawat barang tersebut karena itu adalah aset negara yang dipinjam bagaimana bukan aset negara yang dalam penguasaan Nah di sinilah tentang hukum ini maka pasal ini yang dimaksud dengan di dalam penjelasan apa anak 80 ini yang tanpa 60 ini penghapusan karena sebab-sebab lain tapi di pasal 461 itu disebabkan karena kecurian ada dua fase-fase sini di pasal 460 itu sebab lain yang dimaksud dengan pasal 441 huruf g apa pasal 4141 huruf g itu yang dimaksud adalah 441 huruf g 441 huruf g 44 ayat 4 sebab lain Sebab lain yang dimaksud dengan 440 440 penghapusan daftar barang itu a tidak dapat sudah tidak berada dalam penguasaan penggunaan barang atau kuasa pengguna barang makanya di 2 4 60 dan 461 ada dua fase perasa Pak satu karena kecurian satu karena barang itu disebabkan oleh faktor lain yang menyebabkan barang itu perlu dilakukan permohonan penghapusan makanya ini apa ya kalau bapak Gambarkan tadi itu memang kalau di mana Kalau itu barang hilang kalau hilang maka terpenuhi lah hampa dan satu tadi tapi kalau dia tadi lalai kan karena itu mungkin yang kembali lagi karena ini kembali lagi apakah itu Adi ada unsur kesengajaan atau memang tidak disengaja nanti kan dibuktikan ini Pak kan dibuktikan sengaja yang tidak sengaja eee nantikan pengakuan dia dan keterangan dia ini yang nanti kita buktikan di mana Apakah ini dianggap tidak sengaja tapi dia terkurung Pak karena ada eee fakta integritas yang menjaga dan mengamankan barang jadi kewajiban kita itu sebenarnya dipinjamkan aset oleh negara harus menjaga dan mengamankan barang lya itu mungkin pada dasarnya ini kan menjadi muncul ketakutan

**Pembicara 102 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 15:55:16**

Saya jadi muncul ketakutan begini tidak ada ada niat mau menghilangkan justru kita sangat terbantu dengan saya ini saya kenapa Saya selalu tanya tape ini karena ini barang yang ini barang kecil dan ini Aduh rawan sekali kenapa apalagi kita nih kalau kita simpan di rumah namanya barang kita ini tidak diminta-minta ini kita tidak sama sekali tidak ada mendoakan bahwa ini mau hilang ini kan kita sudah jaga ini taruh di rumah setiap kita pulang kerja kita taruh di rumah terus tiba-tiba ini apakah itu dianggap unsur kelalaian kan tidak juga karena ini barang kita sudah jaga kita taruh di rumah kita simpan cuma memang namanya pencuri ini lebih pintar dari torang jadikan ini bukan unsur kelalaian yang harus kita apa namanya mau mengganti kecuai tadi memang seumpamanya kita di DPR tiba-tiba saya bawa ini terus saya lupa itu mungkin saya punya lalai tapi kan kalau hilang kan kita bisa buktikan dengan surat keterangan kepolisian dengan kronologisnya nanti polisi bisa menilai Apakah ini kelalaian dari saya selaku yang ditiptkan barang

atau memang bukan karena begini Kenapa saya harus kejar pasal ini pak ini kan diri menjadi bumerang buat kita yang pemegang ini kok memang betul-betul hilang kita harus dipaksakan untuk mengganti sedangkan di pasal ini tidak ada kewajiban kita untuk mengganti karena hanya bisa dibuktikan dengan surat kepolisian dan bisa dibuktikan pada saat berita acara pemeriksaan Oh ini memang betul-betul Kehilangan kita perkuat saja di pasal ini gitu karena saya terus terang jadi kuatir makanya sampai hari ini saya itu agak takut bahwa kemana-mana itu mau keluar kota jadi ketakutan sendiri saya kalau hilang baru itu bareng sama saya mau hilang terus dihilang itu dengan barang-barangnya kita seumpamanya ada di handphone di tas dengan Tab hilang masa kita mau sengaja hilang kita punya handphone sendiri nah itu maksud saya jadi saya jadi terus terang jadi ketakutan sendiri ini penghapusan

**Pembicara 103 (Bagian Hukum Setda) 15:58:04**

Apabila tadi itu terjadi 460 ini karena sebab lain ya penghapusan 41 itu karena kecurian Pak 462 itu disebabkan oleh melakukan barang melakukan permohonan dari pengguna barang ini yang tadi itu karena apa Karena ketelaran bisa menyebabkan hilang barang kita bisa mengajukan juga Pak tapi tidak diganti makanya di sini Sebenarnya hilang itu tadi harus dilihat apabila alasan maka ada alasan itu Pak alasan itu adalah suatu hal yang menjelaskan tadi tidak sengaja ini hilang ini kan tadi disengaja dan tidak disengaja hilang ini kan alasan apakah diterima jadi misalnya saya hilang ini hilangnya saya bawa ini milik negara alasannya benar kan maka itu menjadi permohonan untuk penghapusan itu dalam pencatatan ini iya iya Nanti kan nanti nanti kan dari dari itu baru dilihat alasannya diterima atau tidak Nanti dilakukan Penelitian terhadap barang tersebut Nah nanti di ditetapkan nanti di dalam kalau memang hilang dan hasil penelitian itu perlu ditingkatkan maka dibawa ke majelis Iya mungkin jelas ini Pak pasar ini yang Bapak khawatirkan dalam hal ini Kalau lulusan juga sini ada alasan kemudian kepada pengumuman melalui pengelola bahannya saya yang alasan kalau rusak kan itu beda bukan di penghapusan eh Ya diserahkan Bu ke sekretariat sehingga digantikan rusak itu kan karena pemakaian dan lama karena nanti diserahkan di sekretariat yang penting eee masih bentuk tebu jangan sekretaris bawa nomor satu ini TB

**Pembicara 104 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:00:50**

Suatu hari ini tenis minimal 4 eh Memang barang kecurian itu memang betul-betul harus barang itu kecurian karena kenapa kalau kita tidak perkuat ini pasal nanti ke depan ini jadi jadi bumerang buat kita sendiri ah mengaku-ngaku dicuri dihapuskan akhirnya orang pegang barang itu jadi memang harus dipertegas di sini iya kalau bikin mohon maaf surat keterangan ke polisi ini siapapun yang mengadu kehilangan orang buat saya contoh saya bisa saja bikin surat keterangan hilang Pak dan alasan hilangnya sudah Anggaphlah ini saya punya otak yang tidak punya otak

tidak betulin ini saya kasih ke mana saya bikin surat keterangan hilang dan kronologisnya begini bisa saja terjadi Pak

- Pembicara 105 (Bagian Hukum Setda) 16:01:49**  
Bisa saja terjadi begitu Makanya jangan ini kita harus perkuat Pak Supaya diberikan Pak ada pasar penguatan ini bahwa kalau tadi hilang atau sebab lain atau karena permohonan pengempusan dan EE untuk ee barang maka di sini semua dijelas ya kalau kita baca ini dia merunut dia kalau hilang ini prosesnya kalau sebab lain ini prosesnya kalau Ibu tadi jatuh si samornya lain dia pindah pasalnya karena bukan di pasal ini pasal yang satunya yang tadi itu di pencatatan barang ee di pencatatan barang eh barang saya sudah rusak Pak Pak Bayu si Samuel murnya saya mungkin itu jadi di sini masing-masing bagaimana proses penghapusan Bagaimana proses untuk pencatatan perlakuannya cuma diatur dalam regulasi ini jadi semua kita sudah akomodir ini apa yang disampaikan Pak Dokter ini Karena begini karena kemarin ini kan kita punya Tab
- Pembicara 106 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:02:57**  
Iya kan mungkin Pagani tahu kan tidak butuh ada yang mengakui hilang Pak sehingga teman-teman ini tidak dapat karena alasan tadi hilangnya ini apakah ditelusuri pertanyaan Pak coba tanya teman-teman
- Pembicara 107 (Bagian Hukum Setda) 16:03:12**  
Jadi nanti kita lihat di penghapusan nanti Ini catatan juga mungkin di DPR sendiri menjadi catatan untuk dilihat apakah betul-betul melaporkan ini mungkin ya nanti akan dilihat Pak apakah dari kemarin 25 anggota itu mengembalikan berapa jadi nanti akan dia catatan ini dan mungkin diganti Tab terbaru Pak kalau 4 tahun yang lalu itu kan timnya itu masih 4 model-model saya punya soal TAP terbaru Pak begini kan teman-teman
- Pembicara 108 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:03:47**  
Berpikir ini seperti tidak ada penyetaraan kalau tiba-tiba kan yang tidak dapat ini karena karakter yang kembali dari 35 tidak utuh Kong nanti tiba-tiba yang diadakan yang baru itu hanya tidak dapat Eh kalau begitu saya kembalikan saya dapat yang baru supaya adil di mana-mana itu tidak semua kalau ada baru baru semua begitu iya karena tidak ada ini saya sedikit saja menambahkan Ini masalah
- Pembicara 109 (BPKAD Kota Palu) 16:04:26**  
Sama ini saya sama Ibu sekwan kemarin ngobrol-ngobrol sebenarnya ini kan Ibu second pengennya masalah tab ini kan diarahkan ke kami di bidang aset nah kami kan seperti yang saya sampaikan kemarin di Pansus yang kadang-kadang depkolektor itu ketika misalnya opd-nya tidak kamilah yang diminta untuk menghubungi si pemegang barang sehingganya bisa dikembalikan Nah kalau misalnya keterangannya di sini

Sebenarnya Prosesnya sih Pak dari sekuen sendiri itu tinggal melaporkan ke Inspektorat sehingganya ini bisa dicatat sebagai bagian dari ganti rugi gitu Jadi kalau misalnya kami juga bukan angkat tangan sih tidak ini barang kecil kayak bapak bilang tadi barang kecil yang membuat kita nanti ketika kita selesaikan secara persuasif misalnya kami ke sana minta sama yang bersangkutan misalnya yang tadi dinyatakan sudah hilang Nah itu kan tidak ada jalan keluar ya ujung-ujungnya Kita ke dari pihak sekretariat dewan sendiri menyurat ke inspektorat melaporkan bahwasanya memang barang-barang tersebut ini loh daftar barang yang tidak di gitu gimana Pak Bayu sudah dilaporkan belum

**Pembicara 110 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:05:57**

Karena ini kan terus terang ini belum sudah satu tahun nah ini kan menjadi kecemburuan teman-teman yang sebenarnya lh kenapa kita bunuh dapat yang lain sudah dapat Terus tiba-tiba kalau ada pengadaannya nanti yang tidak kalau begitu saya berpikir saya kembalikan saja begini Pak kalau untuk kasus seperti ini kalau misalnya

**Pembicara 111 (BPKAD Kota Palu) 16:06:25**

Tabnya itu tidak layak lagi digunakan silakan kembalikan sekretariat di alih fungsi dari maksudnya dicatat kembali itu namanya jadi dia dicatat bahwa dia rusak apakah rusak ringan kah atau rusak berat kah atau memang kalau sama sekali tidak bisa dipakai lagi ya dicatat di rumah pencatatannya menjadi rusak berat Nah inilah yang menjadi dasar dari sekretariat dewan sendiri untuk mengusulkan pembelian Tab baru kalau barang tersebut masih tercatat baik pastinya itu eee tidak bisa dilakukan pembelian kembali seperti itu Jadi di rumah pencatatan dulu Nggak juga sih kalau misalnya itu kan masa manfaat ketika barang tersebut misalnya tidak disengaja kita ini berpikir normal ya tanpa ada suudzon yang seperti Pak Dokter sampaikan tadi Mungkin barang tersebut sudah pernah jatuh atau apakah tiba-tiba lagi difungsikan silakan belum sampai masa manfaatnya tidak masalah yang penting kan dari ada pernyataan mutlak nanti dari pimpinan opd di sini dalam hal ini sekretariat bahwasanya yang menyatakan bahwa barang-barang yang sudah rusak berat dan itu nanti tetap kami dari dilibatkan kami dari tim aset dan juga dari inspektorat untuk memeriksa kembali Apakah benar barang tersebut memang sudah rusak berat seperti itu tata caranya Terima kasih Pak barang-barang yang

**Pembicara 112 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:07:55**

Kemarin sama teman-teman supaya jangan ada yang punya ada yang tidak mungkin Pak Bayu dari sekretariat mungkin bisa disampaikan Ibu second untuk segera menikah lanjutin ini Pak karena sudah 1 tahun jadi begini Pak Dokter ini baku perasaan tidak enak sebenarnya kalau perasaan tidak bekuin Nanti seenaknya nanti teman-teman yang duduk hari ini bisa

- Pembicara 113 (Bagian Hukum Setda) 16:09:20**  
Kalau begitu bagian dari aset sudah harus memiliki lanjuti saya ambil jalan tengah Apa mungkin langsung saja disurati inspektorat karena tentunya yang baik yang tidak baik kan Datanya ada sama sekretariat dewan dari sekretariat dewan memang menyurat saja ke inspektorat Siapa yang belum kembalikan Siapa yang minta diganti supaya semuanya kelir ya kan sehingga pencatatan asetnya bagus 65
- Pembicara 114 (Zet Pakan, S.Sos) 16:09:37**  
Ya agak panjang-panjang ini silakan 466 ya sampai 470 sekaligus Pak Bayu menentukan di area karena ini masih penghapusan sekarang kita ke 471 ini agak-agak pendek sampai 480 ini 480  
Ya kita buka 481 48 4
- Pembicara 115 (BPKAD Kota Palu) 16:14:17**  
Mohon izin Pak ketua di sini di 482 ini ini merupakan rincian dari kegiatan pengelolaan barang milik daerah karena pengelolaan barang milik daerah di sini ini terdiri dari penggunaan yang awalnya itu cuman ini berapa ini yang dia Sebutkan penggunaan pemanfaatan penataan pemeliharaan dan pengamanan iya ini di rinci mereka rinci menjadi a b c d gitu itu perubahannya jadi setiap abcd ini mereka Jelaskan lagi satu persatu ke bawah makanya dia agak panjang seperti itu penggunaan seperti apa pengguna barang itu melakukan pemantauan di segini Seperti apa jadi seperti ini dia punya anak Iya Lebih detail lagi Pak sudah lanjut
- Pembicara 116 (Zet Pakan, S.Sos) 16:14:55**  
483 83 ya sampai 488
- Pembicara 117 (Muslimun, S.E) 16:16:20**  
Tunggu dulu pasal 485 poin a penggunaan barang melakukan fertilisasi barang milik daerah paling rendah satu kali dalam 5 tahun kita bisa rubah tidak jangan 5 tahun sekali harusnya 2 tahun sekali karena yang maksudnya begini kalau 5 tahun sekali kita melakukan inventarisasi Saya yakin banyak yang sudah berpindah misalkan atau rusak tapi kalau setiap 2 tahun sekali kita melakukan vitalisasi maka ini bisa terkawal bisa tercatat bisa proses pengawasannya lebih enak nah kedua belum saya lihat juga ini untuk memasukkan dalam proses digitalisasi dalam bentuk aspek tadi itu kalau kita ingin membuat aplikasi masuk di mana dia nah harusnya ini bisa masuk di poin berapa kalau kita mau inginkan ada aplikasi yang berkaitan dengan aset kalau ini diatur dalam regulasi kan enak dia berarti menjadi keharusan dia suka tidak suka ya harus di budgetkan masuk di mana kira-kira Ibu nah cuma saya punya permintaan yang barang milik daerah paling rendah satu kali dalam 5 tahun bisa dirubah tidak itu minimal 2 tahun sekali kita apa kita pencatatan

**Pembicara 118 (BPKAD Kota Palu) 16:17:19**  
Mohon maaf kalau dari pemahaman saya Pak kalau yang paling rendah itu berarti paling sedikit jadi dalam 5 tahun itu paling tidak kita sekali melakukan inventarisasi jadi lebih dari satu kali itu tidak masalah Pak jadi contoh-contoh nih ya kami dari Tahun 2022 sampai sekarang itu setiap tahun melakukan inventarisasi gitu walaupun karena saking banyaknya aset kita yang masih belum tertib makanya sampai tahun ini juga belum selesai-selesai secara keseluruhan Jadi kami lakukan itu bertahap begitu Pak jadi Maksudnya kami lakukannya itu perkip misalnya keep tanah belum selesai kami belum berpindah ke Kip lain seperti itu Jadi kenapa kita tidak bahas yang tegas dalam

**Pembicara 119 (Muslimun, S.E) 16:18:13**  
Maksudnya bahasa yang tegas ini misalkan kalau kita minta dalam kan ini resep paling kurang ya satu kali pencatatan itu minimal 5 tahun artinya masih ada range dalam 1 tahun misalkan Ibu Ningsih minta tadi kami melakukan pencatatan terus ini setiap tahun Nama saya Kenapa tidak diaturan ini maksudnya ditegaskan saja setiap tahun harus ada pencatatan rutin ya suka tidak suka kalau memang teman-teman ini kurang personal ini kewajiban pemerintah untuk menambah personal sehingga tidak ada kata yang menurut saya ini kan bahasa mengambang bahasa Kalau bahasa hukumnya tidak tegas

**Pembicara 120 (Bagian Hukum Setda) 16:19:16**  
Izin Pak Muslimun Norma ini sebenarnya norma yang sudah normatif Pak diangkat dari dalam Permendagri 19 2016 pasal 476 dia normatif mutatis iya norma Ini sebenarnya kata paling sedikit ini diartikan dalam kurung 5 tahun bisa dilakukan evaluasi setiap satu kali satu tahun jadi dia sudah normatif Pak tidak bisa kita menormalkan kembali dalam regulasi Karena dia sudah menjadi regulasi Iya jadi tidak tidak boleh kita merubahnya pak mohon izin Pak karena sudah Iya di Tuhan itu Pak Yang Maha Kuasa

**Pembicara 121 (BPKAD Kota Palu) 16:19:52**  
Dari sisi pasal ini pasal penatausahaan pasal penetasan pun dari aturan Permendagri itu berkaitan erat dengan Permendagri 47 tahun 2021 terkait penatausahaan ini taksasi dan pelaporan di permainan Negeri tersebut dikatakan bahwa pengguna barang itu wajib membuat laporan per semester dan tahunan yang secara tidak langsung pengguna barang itu akan melakukan inventarisasi Mandiri akan melakukan inventarisasi Mandiri terhadap barang milik daerah yang dikuasainya itu makanya di Permendagri 7 ini yang di yang disebut di dalam Perda itu menyebutkan paling sedikit 1 tahun eh paling sedikit sekali dalam 5 tahun karena mendukung e Permendagri 47 tahun 2001 yang telah dikeluarkan oleh Kemendagri sekian eh pimpinan

**Pembicara 122 (Zet Pakan, S.Sos) 16:21:05**

Ya silakan

**Pembicara 123 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:21:22**

Pimpinan..

Di pasal 485 ini inventarisasi saya menyambung saja dengan Pak Muslimin apakah bisa kita tambahkan ini masalah inventarisasi elektronik inventarisasi seperti di daerah lain nah kalau ini tidak dicantumkan di sini berarti kita tidak punya keinginan untuk melakukan ikatan inventarisasi ini nah coba kita merumuskan supaya ini kan nanti berkaitan dengan budget supaya ketika ini bisa kita masukkan dalam pasal ini mau tidak mau kan Bisa nanti dimasukkan anggarannya kan Bukan buat kita buat pemerintah daerah untuk mengamankan aset-aset sehingga nanti bisa terkoneksi dengan siapapun orang bisa melihat Oh ini aset kita secara e-katalog kan sekarang semuanya sudah sudah apa namanya by system kan bukan manual lagi tetap kita menggunakan manual tapi kan kita harus mencatatkan di inventarisasi seperti di daerah-daerah lain coba nanti Ibu bisa di apa namanya Coba kita kalau kalau saya sih masukkan saja dulu pasalnya ini nanti kebijakan untuk penganggaran nanti di kemudian hari yang penting ada dulu ini supaya ada ketegasan kita untuk supaya pemerintah daerah untuk supaya bisa menganggarkan ini kalau ndak ada ini berarti kan sudah tidak ada anggarannya untuk melakukan kalau kita bisa masukkan kan bisa dirumuskan kembali masalah penganggaran pembuatan aplikasi dan segala macam saya kira itu saja dari saya

**Pembicara 124 (BPKAD Kota Palu) 16:23:13**

Izin Pak Ketua sedikit Terima kasih sekali buat Pak dokter dan Bapak Ibu yang ada di Pansus yang terhormat sini yang telah mendukung dari tadi kan kami saya bahagia sekali Pak karena ternyata banyak yang berpihak kepada ee penertiban aset ini gitu Yang kemarin-kemarin ini mungkin dipandang sebelah mata tapi ternyata Makin ke sini ternyata kebutuhan ataupun kepentingan aset ini ternyata memang baru disadari pada saat beberapa tahun terakhir ini ya apa namanya ya terkait dengan tadi inventarisasi misalnya sebenarnya secara pada saat Pansus kemarin pun saya sudah menyampaikan bahwa pedoman dari pengelolaan aset ini kami memegang ada dua Permendagri yang pertama itu ada Permendagri 19 yang dirubah ke Permendagri 7 sekarang kemudian ada Permendagri 47 terkait dengan penataan pembukuan tata cara pembukuan penatausahaan dan inventarisasi itu sendiri seperti itu jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kalau misalnya bisa didorong di dalam Perda ini untuk eh inventarisasi misalnya karena apa kemarin kita baru ada rakor dengan Kementerian Dalam Negeri di grandsha nah ini juga Pak Gandi juga besok ini akan berangkat terkait dengan penerapan sipd BMD untuk Kota Palu jadi memang dari Kementerian Dalam Negeri juga tahun depan itu sudah mewajibkan seluruh Pemda itu untuk menggunakan aplikasi sipd BMD sehingga nanti bukan cuman sipd

perencanaan penganggaran plus nanti Insyaallah di tahun depan kalau misalnya kita sudah bisa istilahnya bisa berintegrasi dengan stpdbmda itu kita juga sudah punya si PD BMD jadi satu kesatuan sipd itu ini informasi juga saya sampaikan kepada anggota DM yang terhormat insyaallah itu kita kan bekerja sama dengan Kemendagri terkait dengan penerapan sipd BMD dan kita akan mengintegrasikan aplikasi yang ada di kita sekarang dengan aplikasi untuk menyinkronkan datanya kita akan terpusat semua sama dengan sipd perencanaan yang ada di Bappeda SD ipd penganggaran yang ada di kami sendiri di keuangan terkait dengan pengelolaan keuangannya dan sipd BMD yang sementara ini akan berjalan seperti itu pak informasinya terima kasih

**Pembicara 125 (Muslimun, S.E) 16:25:49**

Pak Doktor itu menjadi penting Bu maksud saya kenapa dia penting harus terintegrasi di dalam aturan ini supaya kita tidak ada lagi cantolan sebelahnya Minimal dia sudah masuk semua dalam ini jadi minimal teman-teman jadi kuat artinya kalau dia sudah masuk dalam pasal itu maka sudah tidak suka pemerintah daerah harus anggarkan

**Pembicara 126 (Bagian Hukum Setda) 16:26:19**

Izin pak Kalau di tadi saya diskusi dengan Pak Ghazali sebagai pejabat fungsional perancang sunjang ini suncang berguncang ini dua hal yang saya bilang kita masukkan di inventarisasi atau nanti kita di bab terakhir kita membuka satu bab khusus untuk sistem elektronik BMD jadi kita buka satu bab khusus berbicara sistem elektronik jadi nanti di situ tidak tidak mau tidak mengganggu sentralisasi jadi nanti sistem elektronik jadi nanti meng-cover semua dari bab atas sampai dengan kondisi yang kita inginkan jadi kita akan menjawab itu nanti di babak terakhir ya jadi catatan terus sendiri Iya nanti kita masukkan di bab terakhir sampai kalau Bila perlu sampai aplikasinya Iya nanti kita bukakan di bab terakhir sistem elektronik namanya Mungkin informasi mungkin ya jadi oke iya

**Pembicara 127 (Zet Pakan, S.Sos) 16:27:34**

iya di akomodir sampai di mana tadinya oh ya Sudah sampai di mana tadi 488 ya jadi Pak ketua kalau habis ini komunity traktir sama bagian aset ibu ibu ini sini sebelum datang tadi dia sudah Siapkan tempat Oh gitu Iya sudah ada bocoran dari Pak Bayu makanya lambat agak Sari datang sudah suruh ke tempat

Ya baik kita buka 489 489 lumayan panjang ini kalau kita mau ya 49 495 lah 495

Pas ya karena usulan matriksnya tidak ada

Ya 496 ya boleh sampai 500 pak ganti ini terkait soal jumlah personil di teman-teman

**Pembicara 128 (Muslimun, S.E) 16:33:43**

Pak Gandi soal Di bagian AC itu kalau yang punya sertifikasi berapa

orang waktu itu kan jawabannya 2 kalau lihat asetnya kita yang sebanyak hampir 2 triliun kira-kira soalnya berapa yang harus bersertifikasi izin pimpinan menjawab untuk perbandingan antara Sulawesi se Sulawesi Kota Palu lebih banyak dibandingkan ya dua itu sudah banyak sudah banyak jadi kalau untuk perbandingan antara jumlah aset dengan jumlah penilai itu belum bisa dibandingkan karena memang beban-beban itu kalau mau dibilang dengan jumlah ketersediaan penilai itu masih sangat rendah seperti itu jadi selama ini dan sampai sekarang juga kami masih dibantu oleh tim kpknl untuk menilai seperti itu

**Pembicara 129 (BPKAD Kota Palu) 16:34:07**

Artinya kalau mau kita ambil perbandingan di wilayah Sulawesi Palu ini kelihatannya lebih siap tapi kan Kalau lihat beban kerja kan ini sebenarnya tidak cukup boleh mana

**Pembicara 130 (Muslimun, S.E) 16:34:14**

Ini mengganggu Padahal dia reperda sebelah ini ini kerjanya ini Laju betulan saya tidak pakai gulai semua semua rata-rata tidak karena dalam ini sudah manis-manis ini oke saya Lanjut Ya maksudnya begini Tadi kan waktu itu ini menjadi rekomendasi rekomendasinya kita terkait soal Ada beberapa pasal sebelumnya waktu di awal-awal kita nah maksud saya dengan aset sebanyak 2 triliun ini dengan hanya 2 yang bersertifikasi harusnya beban kerjanya kan berat berat dalam arti Kalau ada masalah jadi pasti bermasalah kita yang cuma dua orang ini Nah harusnya kalau lihat kompilasi dari jumlah personil yang ada di dalam Komposisinya harusnya berapa yang bersertifikasi kalau 5 orang cukup tidak

**Pembicara 131 (BPKAD Kota Palu) 16:35:37**

Kalau dibilang 5 juga seperti itu karena memang beban penilai itu Pak tergantung juga dengan kondisi barang yang rusak berat yang akan dinilai seperti itu pun dengan barang yang akan dilaporkan untuk pemanfaatan seperti itu karena pemanfaatan ini dinilai sekali dalam tahap.e seperti itu jadi apabila penilaian terhadap pemanfaatan itu sudah selesai itu sudah selesai juga pekerjaan penilai tapi yang menjadi masalah adalah penilaian tentang barang yang akan dijual dalam kondisi rusak berat itu yang memungkinkan jumlah tenaga penilai yang lebih dari dua seperti itu kan sekarang kota Palu ini kan Kalau lihat barang ini kan mulai usang-usang sudah mulai banyak stok tua ini

**Pembicara 132 (Muslimun, S.E) 16:36:38**

Nah Suka tidak suka bebannya pasti berat nanti kalau untuk melakukan penilaian karena contoh misalkan soal kendaraan kebijakan pemerintah kota ke depan kan tidak lagi membeli yang baru tapi kita lebih banyak sewa artinya beban teman-teman di gua ini kan mulai berkurang tapi stok barang kita yang tua ini sudah menumpuk ini nah maksud saya kalau itu menjadi penting Nanti bisa kita sampaikan ke teman-teman banggar

untuk menambah kapasitas dia harus di-upgrade ini harus untuk menuju ke jenjang

**Pembicara 133 (Bagian Hukum Setda) 16:37:36**

Yang jumlah personilnya menjadi apa tenaga penilaian Pak pimpinan bahwa memang kalau dilihat dari personil yang ada di bidang aset sendiri dan kabut aset mengatakan di bidang itu hanya 8 orang pak 8 orang tenaga lapangan maka mungkin kalau dilihat dari personil karena pertama kita menunggu undangan dulu penyampaian dulu Pak ada Diklat ini baru-baru kita boleh kita mau anggarkan juga kalau tidak diklatnya Pak hanya mubazir jadi informasi itu nanti pak menjadi catatan berapa sih kebutuhan lagi jadi kondisi ini tadi saya tanya ke ibu aset 5 sudah maksimal Jadi kalau ini dua kita sisa menambahkan 3 lagi itu ukuran maksimal tetapi sudah gambaran untuk bisa menyelesaikan karena kan ada dukungan kpknl juga kita pak ya terhadap kegiatan-kegiatan lainnya informasi dari pusat ini yang sering tidak sampai pak dianggarkan tahun ini tidak diklatnya kan dianggarkan tahun depan belum ada juga digilatnya pak jadi pasti ada di anggarkan ada di kelas ini

**Pembicara 134 (Muslimun, S.E) 16:39:00**

Temannya tolong yang di pemerintah kalau sudah bagus di situ itu ditarik ke sini ditarik ke sini eh hilang lagi stok di situ iya izin Pak karena dia pejabat fungsional pejabat fungsional itu pak Beda dengan pejabat struktural mereka nanti dengan penilaian dengan sistem kenaikan pangkat sendiri dengan gaji sendiri kecuali mereka ingin berpindah kayak siapa tanya banyak ini elang elang terbang Pak jadi pindah di sana Besok jabatan pindah lagi pindah ke sana Besok jabatan pindah lagi Makanya kalau mereka ini rumpun Pak rumpun fungsional dan memang profesi memang adalah sudah diversifikasi penilai jadi selama mereka jadi penilaian jadi Jabatan itu nanti mengikuti jadi mengikuti jabatan yang ada fungsional sekarang kan kita masih sementara memperbaiki rumpun jabatan juga Pak mana rumpun jabatan yang masih akan kita rubah ke struktural mana rumpun jabatan yang akan kita pertahankan ke fungsional jadi mudah-mudahan pak Gandhi ini saya lihat sampai tua mungkin berkaitan dengan

**Pembicara 135 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:40:47**

Berkaitan dengan tadi jabatan fungsional Apakah yang di Pol PP yang bagian pemeriksa itu juga jabatan fungsional

**Pembicara 136 (Bagian Hukum Setda) 16:40:57**

Ya saya PNS Pak banyak jadi inspektorat saya audit penyidik saya jadi untuk PNS mohon maaf PNS ini memang sekolah khusus dia menetap di opd-opd hanya berdasarkan regulasi itu ada di Pol PP dan sekretariatnya

ada di Pol PP jadi di Pol PP itu ada sekretariat dari ppns Jadi kalau ppns sekarang itu kalau dia bergabung di jabatan fungsional maka dia rumpun fungsional tapi sekarang ini PNS itu masih 2 di 2 rumpun bisa ditutup bisa di PNS Tetapi dia sudah sekolah selama 1 bulan dan mendapatkan izin dari menkumham sebagai penyidik pegawai negeri sipil selama itu dia tidak bisa jadi PNS dan ada hal yang perlu dilakukan pembaharuan terhadap regulasi penyidikanya itu yang melakukan makanya kalau ppns ini Siapa yang ingin tetap di fungsional tapi rata-rata belum ada yang sekolah untuk itu belum ada pnsnya makanya sekretariatnya belum terbentuk makanya tahun depan kita bentuk

- Pembicara 137 (Dr. Arif Miladi Wali, S.Sos.,M.Si) 16:42:14**  
Karena kemarin penegakan Perda itu lemah pengawasan dan penegakan Perda lemah karena alasannya itu tadi ppns atau apa penyidik apanya itu kurang Nah apakah selama Apakah tidak diusulkan kembali untuk untuk apa yang sekolah di sekolahkan lagi untuk ini supaya penegakan kita lebih lebih baik lagi diusulkan semua opd siap jadi masing-masing
- Pembicara 138 (Bagian Hukum Setda) 16:42:42**  
Tergantung nanti itu lagi kalau disiapkan anggaran dan kedua sekolahnya dibuka kalau ppns tidak dibuka sekolahnya maka dia tidak bisa mengikuti PNS karena kurun waktu kalau dia sebagai penyidik paling tidak dia 2 minggu mengikuti diklatnya Kalau dia mau ikut yang lebih terampil 1 bulan 3 bulan ya 3 bulan di Mega Mendut ya sudah menunggu kalau kita bukan mangga mendung mangga perut Jadi iya dikit aja yang ada jadi di posisi 496 terima kasih
- Pembicara 139 (Zet Pakan, S.Sos) 16:43:32**  
Jangan lagi sampai 500 kita buka 51 sampai ya 510 510 rumah negara ini di mana yang ASN ini yang pegawai adakah
- Pembicara 140 (Muslimun, S.E) 16:44:48**  
Kalau provinsi kan seingat saya dulu ada di Bumi Nyiur dengan di mana jalan Gelatik sekaligus di Tanjung Tanjung itu kan banyak yang masuk menjadi Perumahan provinsi kalau di kota di mana
- Pembicara 141 (BPKAD Kota Palu) 16:44:54**  
Rumah negara untuk Pemkot Palu tidak ada Pak tapi kalau untuk rumah dokter ada ada rumah dokter rumah dokter di sekolah rumah guru itu tapi hanya ada beberapa saja Pak kalau rumah dokter di mana rumah dokter itu contoh di Puskesmas kawatuna Pak Puskesmas kawatunya tuh ada rumah dokter puskesmasnya ya Iya jadi dikompleks Puskesmas iya heeh rumah dokter atau rumah perawat
- Pembicara 142 (Muslimun, S.E) 16:45:35**  
Atau yang berupa kawasan ada tidak begini kalau di provinsi kan dia

berupa kawasan misalkan bunyinya yuk satu caping untuk kalau kota tidak ada tidak ada Alfian penting dia hadir dia penyiapan rumah developer dengan harga yang bernama

**Pembicara 143 (Zet Pakan, S.Sos) 16:46:31**  
Baik kita buka 511 Ya mungkin sampai 515 15  
Ya 500 516 sampai 520  
521 521 sampai 528  
Ya 521 sampai 528

**Pembicara 144 (Muslimun, S.E) 16:51:38**  
Bagian aset ini yang kita punya aset di daerah lingkup Walikota itu yang dulu Perumahan kan dulu Kalau tidak salah Ingat saya ada perumahan di situ kan rumah jabatannya Kapolres itu memang Kapolres punya atau kota pun

**Pembicara 145 (Bagian Hukum Setda) 16:52:04**  
Kan untuk tanda-tanda situ iya jadi yang menjadi penguasa kita itu hanya rumah jabatan walikota dulu itu bekas dari pacuan Kak dulu dulu itu pak anu pak pacuan kuda pengadilan Agama Polres rumah apa pribadinya itu itu semua milik dari Polres dan pengadilan agama rumah Kapolres termasuk rumah tercatat sebagai aset Polres Pak bukan aset pemerintah kota begitu juga Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Pak iya bukan bukan menjadi aset pemerintah kota Pak Saya hafal semua pak dan saya perintah di depan Pak tulemo Pak tapi saya sudah dibakar sama pemerintah

**Pembicara 146 (Muslimun, S.E) 16:53:18**  
Kapolres yang lama ini itu kan belum itu masih statusnya milik Pak Itulah itu masih milik kota atau masih miliknya Polres

**Pembicara 147 (Bagian Hukum Setda) 16:53:26**  
Sengketa dan masyarakat itu Pak masyarakat masih klaim bahwa itu kan dulu bekas ee e apa sekolah sekolah diambil oleh Polres eh pemilik dari yang menghibahkan sekolah yang keberatan itu Pak masih sengketa pak Tapi saya lihat pencatatan terakhir dengan Polres dia sudah kuasai Pak yang yang mengajukan keberatan ini tidak punya upaya Pak karena penegak hukum ya ini kalau ada Pak Alfian ini dia akan bahas tuntas seni 528 ini sangat asik

**Pembicara 148 (Zet Pakan, S.Sos) 16:54:10**  
Sangat Siti gas maunya dia baik sampai 528

**Pembicara 149 (Bagian Hukum Setda) 16:54:19**  
Mungkin izin Pak di sini akan kami sisipkan tadi sebelum ketentuan lain karena satu bab dengan sistem elektronik itu Pak

- Pembicara 150 (Zet Pakan, S.Sos) 16:55:14**  
Ya baik kita masuk di pasal 529 ya mungkin sekalian sampai 533 533 jadi ini pasal terakhir nanti ini akan berubah setelah munculnya perubahan di BAB ya inventarisasi  
Sampai pasal 533
- Pembicara 151 (BPKAD Kota Palu) 16:58:50**  
Masalahnya ini Pak kemarin pas kita di KPK ditanyakan juga ini Perda kan penilaiannya kita Perda ini kan 90 poin karena selama ini kita orang Kirim terus Itu cuma draftnya cuma barang kasih ya semoga lah pak itu bisa mengungkit kita punya nilai mcp jadi sekarang kan 60 berapa ya 67 67 iya 87 ini Perda memang Pak Terima kasih banyak Pak ketua dan bapak-ba terhormat Bapak Ibu yang terhormat Eh betul Pak Insya Allah
- Pembicara 152 (Zet Pakan, S.Sos) 17:00:15**  
Masih ada tambahan  
Bab 17 tentang elektro  
Ya Coba dibacakan Pak Bayu
- Pembicara 153 (Sekretariat DPRD) 17:03:25**  
Bab 17 sistem informasi pasal 529 ayat 1 penyelenggaraan BMD di daerah dapat dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik ayat 2 sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada S1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pemerintah atau pihak lain

---

Pimpinan Rapat

Kota Palu, 04 November 2025  
Sekretaris Rapat

**Zet Pakan, S.Sos**

**Husna, S.H.,M.H**